

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Asep Kurniawan

Syaikhu Usman

Valentina Y. D. Utari

Dedy Hermansyah

LAPORAN LAPANGAN SMERU

**Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

Asep Kurniawan

Syaikhu Usman

Valentina Y. D. Utari

Dedy Hermansyah

Editor

Fandi Muhammad H.

The SMERU Research Institute

Maret 2020

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis: Asep Kurniawan, Syaikh Usman, Valentina Y. D. Utari, dan Dedy Hermansyah

Editor: Fandi Muhammad H.

Foto Sampul: Dok. SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Asep Kurniawan

Laporan lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah – Provinsi Nusa Tenggara Barat./ Ditulis oleh Asep Kurniawan, Syaikh Usman, Valentina Y. D. Utari, Dedy Hermansyah.

iv; 58 hlm.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-54-4 (PDF)

ISBN 978-623-7492-16-0

1. Pendidikan 2. Kabupaten Lombok Tengah

I. Judul

370.7 –ddc 23

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, Maret 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

TIM PENELITIAN

Peneliti SMERU

Asep Kurniawan

Syaikhu Usman

Valentina Y. D. Utari

Peneliti Lapangan

Dedy Hermansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya bupati, sekretaris daerah, dan kepala badan/dinas bidang pendidikan beserta stafnya, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasinya yang berharga. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu mereka untuk diwawancarai. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di Kabupaten Lombok Tengah dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Asep Kurniawan, Syaikhul Usman, Valentina Y. D. Utari, dan Dedy Hermansyah

Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan The SMERU Research Institute (SMERU) melakukan studi diagnostik atas sistem pendidikan dasar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengetahui apa saja yang memengaruhi capaian pembelajaran murid di tingkat pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini melakukan pemetaan pemangku kepentingan, analisis ekonomi politik atas permasalahan pendidikan, dan pemetaan kebijakan atau inovasi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yakni wawancara mendalam, wawancara kelompok, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), dan kajian singkat dokumen.

Temuan lapangan SMERU menunjukkan bahwa masih rendahnya capaian pembelajaran murid tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lombok Tengah berkaitan erat dengan rendahnya kualitas guru, tidak tuntasnya pembelajaran murid, dan kurangnya perhatian wali murid di rumah. Berbagai kelompok pemangku kepentingan memperlihatkan potensi untuk berkontribusi dan kemauan yang tinggi untuk meningkatkan capaian pembelajaran murid. Akan tetapi, para pemangku kepentingan jarang mendapatkan kesempatan untuk bertemu, berdiskusi, dan mencari solusi untuk masalah pembelajaran murid. Meskipun demikian, SMERU menemukan bahwa secara terpisah, beberapa pemangku kepentingan telah melakukan beberapa inovasi di tingkat sekolah dan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung dijalankan untuk meningkatkan capaian pembelajaran murid.

Kata kunci: pendidikan dasar, inovasi pendidikan, kemampuan calistung, Lombok Tengah, kebijakan pendidikan

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metode Penelitian	1
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PEMBELAJARAN	2
2.1 Berbagai Masalah dalam Pembelajaran Pendidikan Dasar	2
2.2 Ketidaktuntasan Belajar Murid	3
2.3 Pelatihan Guru Kurang Mendapat Dukungan	3
2.4 Supervisi dan Pengawasan Kerap Dilewatkan	4
2.5 Kebijakan yang Dipengaruhi Pertimbangan Politis	5
2.6 Pergeseran Pandangan Masyarakat atas Manfaat Pendidikan	5
2.7 Hubungan dan Komunikasi Antarpemangku Kepentingan	6
III. ANALISIS INOVASI PEMBELAJARAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH	8
IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN: KETERTARIKAN DAN PENGARUH	10
4.1 Pengantar	10
4.2 Mutu Guru Penentu Mutu Pembelajaran	10
4.3 Peran Kepala Sekolah sebagai Pembina Guru	10
4.4 Peran Dinas Dikpora sebagai Regulator Utama Pendidikan	11
4.5 Peran Kelompok Pendukung Pengembangan Pendidikan	12
4.6 Peran Masyarakat dan Wali Murid	13
LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Sepuluh Isu Teratas Menurut Kelompok Pemangku Kepentingan	15
Lampiran 2 Ringkasan Metode Komunikasi Menurut Kelompok Pemangku Kepentingan	26
Lampiran 3 Tabel A1. Daftar Mitra Potensial di Daerah	29
Lampiran 4 Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan	31
Lampiran 5 Peta Pemangku Kepentingan	41
Lampiran 6 Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan	42
Lampiran 7 Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan	43
Lampiran 8 Analisis Pohon Masalah Pembelajaran Pendidikan Dasar	46
Lampiran 9 Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah	47
Lampiran 10 Tabel A5. Basis Data Inovasi Daerah	49
Lampiran 11 Tabel A6. Daftar Perolehan Data Sekunder	51
Lampiran 12 Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan	53

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABK	anak berkebutuhan khusus
APBD	anggaran pendapatan dan belanja daerah
APM	angka partisipasi murni
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
calistung	baca, tulis, dan berhitung
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DFAT	Australian Department of Foreign Affairs and Trade
Dikpora	pendidikan, pemuda, dan olahraga
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
GTT	guru tidak tetap
INOVASI	Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia
K-13	Kurikulum 2013
Kabid Dikdas	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kabid Sosbud	Kepala Bidang Sosial-Budaya
KBM	kegiatan belajar mengajar
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKM	kriteria ketuntasan minimal
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	madrasah ibtidaiah
MTs	madrasah sanawiah
ornop	organisasi nonpemerintah
PAD	pendapatan asli daerah
PAUD	pendidikan anak usia dini
pemda	pemerintah daerah
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PNS	pegawai negeri sipil
rakor	rapat koordinasi
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD	sekolah dasar
sekda	sekretaris daerah

SKPD	satuan kerja perangkat daerah
SMP	sekolah menengah pertama
SMS	<i>short message service</i> (layanan pesan singkat)
SPM	standar pelayanan minimal
S-1	sarjana
TKI	tenaga kerja Indonesia
tupoksi	tugas pokok dan fungsi
UKG	uji kompetensi guru
UN	ujian nasional
UPTD	unit pelaksana teknis daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Australia yang diwakili Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program INOVASI bertujuan (i) menemukan bukti apa yang berhasil dan dalam situasi yang bagaimana sehingga hasil belajar siswa di tingkat pendidikan dasar meningkat, dan (ii) memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk kebijakan pendidikan yang lebih berarti serta mengubah praktik ke arah yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan program, INOVASI akan menggunakan pendekatan yang terdiri atas empat komponen yang saling terkait, yaitu pengawasan, evaluasi, penelitian, dan pembelajaran dengan fokus pada tiga aspek: (i) kualitas pengajaran di kelas, (ii) dukungan untuk pengajaran berkualitas, dan (iii) upaya untuk memastikan bahwa seluruh anak belajar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program, INOVASI bekerja sama dengan The SMERU Research Institute untuk melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan di tingkat daerah yang meliputi (i) pemetaan pemangku kepentingan, (ii) analisis politik dan ekonomi atas permasalahan pendidikan yang dihadapi daerah, dan (iii) pemetaan kebijakan atau inovasi pendidikan daerah.

Lombok Tengah merupakan salah satu dari enam kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipilih oleh Kemendikbud dan DFAT sebagai lokasi penelitian. Lima lokasi lainnya adalah kabupaten-kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen, wawancara individu, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Informan yang diwawancarai merupakan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, sekolah, dan desa. Penentuan sekolah yang dikunjungi yang mencakup dua sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP) dilakukan oleh tim INOVASI, sedangkan penetapan kriteria informan dilakukan oleh tim SMERU.

Di Lombok Tengah, pengumpulan data dilakukan pada 18–29 Juli 2016 oleh empat peneliti. Jumlah informan untuk wawancara individu di Lombok Tengah adalah 26 orang di tingkat kabupaten, kecamatan, sekolah, dan desa, sedangkan jumlah informan untuk wawancara kelompok adalah 16 kelompok yang terdiri atas 4 kelompok guru, 4 kelompok orang tua murid, 4 kelompok murid perempuan, dan 4 kelompok murid laki-laki. Sementara itu, FGD dilakukan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PEMBELAJARAN

Pembangunan fisik sekolah selama ini telah memperluas akses anak di hampir seluruh daerah untuk bersekolah dengan angka partisipasi murni (APM) mendekati 100%. Di sisi lain, upaya perbaikan penghasilan guru dalam 15 tahun terakhir telah meningkatkan kesejahteraan mereka. Profesi guru kini menjadi incaran banyak orang. Di Kabupaten Lombok Tengah, hampir separuh guru yang berstatus guru tidak tetap (GTT) berjuang agar segera menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sementara itu, angka rasio murid-guru adalah 14:1 yang berarti jumlah guru sudah berlebihan. Sebenarnya, tanpa ada pengangkatan GTT pun angka rasio guru-murid masih di bawah 30:1. Angka ini masih memungkinkan guru untuk mengelola kelas dengan baik sepanjang ketimpangan distribusi guru antarsekolah dan antarmata pelajaran dapat diperbaiki.

Dengan kondisi seperti itu, muncul pernyataan “urusan pendidikan sudah bisa berjalan sendiri”. Jika pernyataan tersebut diikuti dengan penjelasan tentang rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten ini, dapat dimaknai bahwa alokasi anggaran pendidikan sulit menjadi prioritas. Untungnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ada rumusan tentang upaya “peningkatan mutu pendidikan.” Terkait hal tersebut, program INOVASI dapat membantu memastikan terlaksananya rumusan RPJMD tersebut melalui berbagai usaha untuk memperbaiki mutu pembelajaran murid.

2.1 Berbagai Masalah dalam Pembelajaran Pendidikan Dasar

Empat sekolah yang dikunjungi dalam penelitian ini mengalami persoalan yang sama dalam hal lemahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Hal ini dapat dilihat dari nilai ujian nasional para murid. Namun, hasil wawancara kelompok dengan murid (perempuan dan laki-laki) malah menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang cenderung tertarik dengan Matematika dan Bahasa Indonesia. Ketertarikan murid ternyata tidak berbanding lurus dengan pemahaman mereka mengenai kedua pelajaran tersebut. Mengapa demikian?

Sebagian besar informan menyampaikan rendahnya kualitas guru sebagai penyebab pokok masih lemahnya kemampuan calistung murid. Guru bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman pembelajaran. Tak terelakkan, rendahnya hasil pembelajaran murid sangat dipengaruhi kapasitas guru. Tinggi dan rendahnya mutu guru berpengaruh pada kuat dan lemahnya pemahaman belajar murid. Salah seorang informan pengawas sekolah menilai bahwa guru belum menguasai didaktik metodik dan bahan ajar. Informan ini juga menilai bahwa para guru memiliki komitmen yang rendah terhadap profesinya dan mengerjakan tugas hanya demi memenuhi jam mengajar.

Salah seorang pengurus PGRI menyatakan bahwa hanya sedikit guru yang mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan. “Sekarang tidak ada yang mendorong guru mau membaca,” katanya. Kepala Bidang Sosial-Budaya (Kabid Sosbud) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengatakan secara lebih tegas bahwa banyak guru di daerahnya tidak kreatif dalam mengajar, bahkan sering mengabaikan tugas karena sibuk mengejar tunjangan sertifikasi. “Guru-guru kita lebih banyak terlihat di bank untuk mengurus sertifikasi dibandingkan berada di dalam kelas,” katanya.

Akar permasalahan guru rumit, berkaitan dengan guru sendiri, kepala sekolah, dan lembaga yang berwenang membuat kebijakan. Kabid Dikdas Dikpora menyebutkan bahwa lebih dari separuh guru

di daerahnya belum berkualifikasi sarjana (S-1). Ia juga mengakui bahwa kemampuan para guru dalam menjalankan pembelajaran masih bervariasi. Berdasarkan data yang disampaikannya, guru yang sudah bersertifikasi untuk SD mencapai 45%, sedangkan guru SMP hanya 34%. Angka itu pun rata-rata nilainya masih di bawah standar nasional.

Beberapa narasumber menjelaskan bahwa rendahnya mutu guru dimulai dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tempat mereka “diproduksi”. Banyak guru berasal dari LPTK yang kualitasnya rendah dan tidak tuntas mempelajari didaktik metodik. Imbasnya, mereka mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi. Sebagai contoh, guru kurang menguasai pembuatan kriteria ketuntasan minimal (KKM) atas kompetensi dasar yang harus dikuasai murid. Guru tidak menjadikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai acuan dan tidak memprogram kegiatan belajar mengajar (KBM). Situasi ini bertambah parah, sebagaimana dikemukakan seorang pengawas sekolah, karena para guru tersebut menjadi seperti “motor yang sejak keluar dari dealer tidak pernah diservis”.

2.2 Ketidaktuntasan Belajar Murid

Ketidaktuntasan belajar murid merupakan persoalan besar dalam hal “pembelajaran bagi semua”. Menurut seorang informan yang berprofesi guru, tidak banyak guru yang menguasai pembuatan KKM. Hal ini menyebabkan ketidaktuntasan belajar murid sehingga membuat murid memiliki hasil pembelajaran yang rendah, padahal menurutnya, kalau para guru menguasai KKM, para murid akan mengalami peningkatan pembelajaran secara bertahap.

Masalah ketidaktuntasan belajar ini dibiarkan berlalu tanpa ada penyelesaian. Jika murid mengalami ketidaktuntasan belajar dalam kompetensi dasar pada pelajaran tertentu, dia akan mengalami kesulitan untuk menguasai kompetensi dasar berikutnya. Makin banyak ketidaktuntasan belajar yang dibiarkan, hampir pasti hasil belajar murid akan rendah. Situasi ini diperparah dengan kenyataan bahwa murid diperlakukan sebagai kelompok homogen di kelas, padahal kemampuan dan minat belajar serta bakat setiap murid tentu berbeda.

2.3 Pelatihan Guru Kurang Mendapat Dukungan

Pelatihan untuk guru agar guru dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan kurang mendapat dukungan. Namun, hal ini bukan berarti bahwa guru tidak memiliki saluran atau ruang untuk berkembang. Dalam KBM, tersedia pelatihan, pertemuan, dan diskusi sesama guru untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas. Masalahnya, sebagian besar kepala sekolah tidak memfasilitasi kegiatan yang menunjang profesionalitas guru. Komitmen kepala sekolah dalam hal ini rendah. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menyampaikan otokritik kepada koleganya. Dia menyoroti banyak kepala sekolah yang tidak mau berpikir inovatif. “Teman-teman kepek cenderung apatis, hanya mengikuti apa yang ada saja,” katanya.

Kepala sekolah bukan satu-satunya pihak yang kurang memberikan dukungan terhadap pengembangan profesionalitas guru. Pemerintah daerah (pemda) sendiri tidak merencanakan program yang memadai untuk guru sehingga dapat dikatakan pelatihan bagi guru terbatas. Hal ini diperparah dengan ketidakaktifan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sebagai wadah pembinaan profesi guru. Terkait vakumnya MGMP, Ketua MKKS menyampaikan bahwa sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika para kepala sekolah mau mengalokasikan sebagian anggaran sekolah untuk MGMP. Aturan memperbolehkan alokasi dana BOS untuk membiayai pelatihan guru atau kegiatan MGMP. Namun, hal itu sepenuhnya bergantung

pada kepala sekolah karena dia merupakan pejabat yang berwenang menyusun anggaran sekolahnya. “Selama ini yang saya perhatikan, teman-teman bergerak ketika ada dana stimulan dari pemerintah, baru MGMP-nya hidup. Di Lombok Tengah ini MGMP hampir mati semua, kecuali yang rada-rada hidup, Penjaskes kali ya,” katanya. Akibatnya, profesionalitas guru lemah dan murid tidak bisa mendapatkan cara belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

2.4 Supervisi dan Pengawasan Kerap Dilewatkan

Idealnya, kondisi dan masalah pembelajaran di sekolah bisa diatasi melalui supervisi kepala sekolah kepada para guru. Namun, hal ini dinilai belum optimal karena kualitas kepala sekolah dalam melakukan supervisi kelas masih terbilang rendah. Masih banyak kepala sekolah yang belum menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan kegiatan kecil seperti berkeliling menengok proses pembelajaran yang dijalankan guru-guru di kelas pun jarang dilakukan, padahal, menurut Kepala Dikdas Dikpora, supervisi kelas merupakan upaya untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan guru. Minimnya kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi membuat Dinas Dikpora juga sulit mendapatkan data valid mengenai kondisi guru untuk kebutuhan perencanaan bersama Bappeda.

Pengurus PGRI malah mengatakan bahwa banyak kepala sekolah yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sendiri. “Saya yakin, tidak banyak kepala sekolah yang mengevaluasi hasil belajar. Solusinya, dipertegas dulu kompetensi dan tupoksi [kepala sekolah],” jelas informan. Kondisi terkait masalah kepala sekolah ini diperkeruh dengan turut campurnya kepentingan politik di dalamnya. Menurut informan, pada praktiknya, yang memindahkan kepala sekolah bukan Dinas Dikpora, tetapi tim sukses. Indikator standar menjadi kepala sekolah tidak dipakai.

Selain kepala sekolah, pemangku kepentingan yang langsung bersentuhan dengan guru adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah merupakan pemangku kepentingan yang tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan supervisi untuk membantu guru memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Temuan dari pengawasan dan supervisi akan didiskusikan dengan sesama pengawas sekolah untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Dikpora guna dijadikan bahan pertimbangan atau rujukan untuk saran kepada guru terkait pembelajaran.

Dalam kaitan dengan tupoksi tersebut, pengawas sekolah dinilai masih belum melakukan supervisi akademis terhadap guru dengan baik. Menurut Bappeda, kapasitas pengawas sekolah di Lombok tengah masih rendah, padahal pengawas sekolah memegang peran penting dalam mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran ketika hasil yang didapat dinilai masih kurang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dinas Dikpora yang mencontohkan pengalaman penerapan Kurikulum 2013 (K-13) oleh guru yang sudah dilatih, tetapi pengawas sekolahnya malah tidak tahu apa-apa. Selain itu, Bappeda mengakui bahwa rasio antara jumlah pengawas sekolah dan sekolah yang ada juga masih timpang.

Hal yang berbeda disampaikan oleh informan pengawas sekolah. Menurut pengakuan pengawas sekolah, banyak guru tidak memanfaatkan kesempatan supervisi yang tersedia. Meskipun demikian, ada juga guru yang mau didampingi pengawas sekolah untuk membenahi masalah administrasi dan pengajaran. Namun, lagi-lagi, pengawas sekolah lain mengatakan bahwa saran yang mereka sampaikan kepada guru sering tidak dijalankan, padahal, jika dijalankan oleh guru, saran-saran tersebut akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid. Mereka yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan memiliki alasan yang sangat personal, yakni bahwa mereka sudah mendekati masa pensiun alias sudah makin malas (melakukan perbaikan kualitas).

Di sisi lain, laporan hasil pengawasan sering kali juga tidak dijadikan dasar oleh pemda dalam membuat kebijakan pendidikan. Salah seorang pengawas sekolah memberikan contoh tentang penempatan kepala sekolah yang menurutnya amburadul. Ada kepala sekolah yang sudah dilaporkan bermasalah, tetapi tetap ditempatkan di sekolah yang sama. Ada kepala sekolah yang terlalu lama di satu sekolah, tetapi tidak dipindahkan. Ada juga yang digeser, lalu diangkat lagi. Menurutnya, hal ini semua merupakan imbas politik usai pilkada.

2.5 Kebijakan yang Dipengaruhi Pertimbangan Politis

Seorang informan guru menegaskan bahwa nuansa politis memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan pendidikan. Kebijakan evaluasi guru oleh Dinas Dikpora, terutama dalam pengangkatan dan penempatan guru, sering kali lebih mempertimbangkan kepentingan politis. Dia mengatakan, kadang ada guru yang menumpuk di satu sekolah, sementara di sekolah lain terjadi kekurangan guru. Walau tidak mengakui secara eksplisit, informan Dinas Dikpora dan sekretaris daerah (sekda) mengakui bahwa kedekatan guru dengan lingkaran kekuasaan atau dukungan dalam momen pemilihan kepala daerah (pilkada) memengaruhi proses mutasi di daerahnya. Setidaknya dalam setahun atau dua tahun terjadi mutasi guru dan kepala sekolah. Hal ini, diakui Dinas Dikpora, tidak terlepas dari kepentingan pada saat pemilu.

Mutasi besar-besaran sebagai imbas pertimbangan politis pernah terjadi. Tim sukses dalam proses pilkada banyak “bermain” di belakang penempatan guru dan penunjukan kepala sekolah. Walaupun tidak menyebutkan jumlah, informan organisasi nonpemerintah (ornop) menyampaikan bahwa selepas pilkada, tim sukses pemenang kerap berkeliling ke sekolah-sekolah untuk menawarkan mutasi guru ke lokasi yang lebih baik dengan syarat sejumlah uang yang harus dibayarkan.

Kebijakan mutasi semacam itu sedikit banyak berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Kabid Dikdas Dikpora menggambarkan bahwa sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi, Dinas Dikpora sudah menyelenggarakan pelatihan. Namun, karena kebijakan mutasi, kepala sekolah yang sudah dilatih dijadikan guru kembali. Kemudian, yang tadinya guru diangkat menjadi kepala sekolah, padahal guru yang diangkat itu belum siap dan belum dilatih. Akhirnya, proses supervisi kelas yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah tidak berjalan.

Akibat lainnya adalah bahwa distribusi guru di Lombok Tengah menjadi tidak merata. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para guru lebih suka ditempatkan di perkotaan. Dia menduga, hal ini didasari penilaian bahwa mengajar di kota lebih bergengsi daripada mengajar di desa, padahal, menurutnya, wilayah Lombok Tengah tidak terlalu luas; setiap sudut wilayah juga sudah bisa diakses dengan baik. Akibatnya, sebagian sekolah di perdesaan kekurangan guru PNS. Bahkan, sebagaimana diakui Dinas Dikpora, di beberapa sekolah didapati bahwa guru yang berstatus PNS hanya kepala sekolahnya.

2.6 Pergeseran Pandangan Masyarakat atas Manfaat Pendidikan

Pada era 1980-an, pandangan masyarakat terhadap pendidikan merosot. Banyak lulusan sekolah, bahkan sarjana, memilih menjadi TKI. Mereka berbaur dengan perantau yang tidak memiliki ijazah sekolah. Hasilnya, banyak TKI berhasil memperbaiki taraf hidupnya. Anak putus sekolah menjadi

penjaja berbagai barang kebutuhan wisatawan, dan mereka berhasil mendapatkan cukup banyak uang. Anak-anak meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja di pertanian dan mereka mendapat uang. Fenomena ini membuat banyak warga berpikir, “Buat apa sekolah kalau tanpa sekolah pun orang bisa mendapat uang.”

Keprihatinan terhadap situasi tersebut mendorong beberapa tokoh masyarakat membuat gerakan aksi penyadaran tentang pentingnya pendidikan. Khotbah di masjid, ceramah di pengajian, bimbingan di posyandu, dan lain-lain diisi dengan penjelasan tentang nilai hidup yang sesungguhnya. Nilai itu dapat diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Hidup tidak hanya urusan uang. Berkat gerakan ini, banyak tokoh yang kemudian mendirikan sekolah gratis. Mutu pembelajaran terus diperbaiki dengan mengangkat guru berlatar belakang sarjana yang dipilih secara selektif. Hasilnya, angka putus sekolah menurun dan minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya membaik, walaupun masih banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak mereka kepada guru. Sekarang sudah mulai tertanam rasa malu pada diri orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anaknya. Semua ini merupakan modal sosial dalam upaya membangun dunia pendidikan kita.

Kondisi sosial, khususnya kemampuan orang tua, dalam membantu anak belajar relatif rendah. Anak lebih sering belajar sendiri. Hasil wawancara kelompok dengan orang tua murid mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa mendampingi anak-anaknya belajar karena mereka tidak memahami materi pelajaran anaknya. Mereka hanya bisa mengawasi anak-anaknya dalam belajar. Di luar hal itu, anak-anak belajar sendiri atau belajar dalam kelompok. Selain itu, tidak banyak sekolah yang memberikan pelajaran tambahan untuk menunjang pengetahuan murid, kecuali untuk murid kelas enam dan kelas sembilan dalam rangka menghadapi ujian nasional.

2.7 Hubungan dan Komunikasi Antarpemangku Kepentingan

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran murid, tidak ditemukan komunikasi yang intensif, terpola, dan berkelanjutan, padahal jumlah pelaku pendidikan, terutama guru, terbilang besar dan tersebar di 597 SD dan 146 SMP, belum termasuk madrasah ibtidaiah (MI) dan madrasah sanawiah (MTs). Gejala ini tampak di semua tingkat, dari Dinas Dikpora, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, murid, sampai orang tua. Di Dinas Dikpora, komunikasi lebih banyak mengandalkan tatap muka seperti rapat koordinasi (rakor), pelatihan, ataupun pertemuan langsung. Kabid Dikdas Dikpora mengatakan bahwa mereka mengadakan rakor dengan seluruh UPTD setiap bulan. Rapat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan dan pembahasan pelaksanaannya. Biasanya UPTD kemudian meneruskan informasi melalui rakor di tingkat kecamatan bersama kepala sekolah.

Berkaitan dengan rapat, media komunikasi digunakan untuk mengundang peserta rapat, baik dengan menelepon langsung atau melalui layanan pesan singkat (*short message service*/SMS). Namun, surat resmi tetap dibuat dan diambil peserta pada saat rapat. Jika ada kebutuhan mendadak, telepon dan SMS digunakan untuk menyepakati janji. Hal ini dilakukan dalam komunikasi Dinas Dikpora dengan pelaku pendidikan di bawahnya. Komunikasi horizontal oleh Dinas Dikpora dengan Dewan Pendidikan, DPRD kabupaten, atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, menggunakan surat resmi dan tatap muka. Hanya dalam hal-hal tertentu, seperti konfirmasi rencana pertemuan atau hal mendesak terkait pelaksanaan kebijakan, komunikasi dilakukan melalui telepon. Selain itu, tampaknya aplikasi media sosial masih dipandang “tidak pantas” untuk digunakan sebagai alat komunikasi antarpemangku kepentingan. “Itu kan untuk anak-anak. Saya sendiri pakai Whatsapp karena dipaksa anak saya,” kata salah satu kepala UPTD.

Selain rakor antarpejabat struktural, ada pula rakor pengawas sekolah (baik SMP maupun SD) yang dilaksanakan setiap bulan. Agenda yang dibicarakan sebatas pertukaran informasi mengenai pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah dan kebijakan terbaru. Dengan alasan yang sama seperti di atas, komunikasi antarpengawas sekolah juga belum menggunakan aplikasi media sosial. Telepon dan SMS dianggap cukup, baik di antara mereka maupun antara mereka dan kepala sekolah/guru.

Sementara itu, para kepala sekolah (negeri dan swasta) pada setiap tingkat menjalin komunikasi melalui forum MKKS. Hanya MKKS SMP yang mengatakan bahwa mereka bertemu setiap bulan dan pertemuan dilaksanakan secara bergilir di setiap sekolah. Untuk tingkat SD, MKKS tidak rutin melaksanakan pertemuan. Kalaupun ada, pertemuan biasanya diselenggarakan untuk membahas persiapan ujian sekolah/nasional. Pertemuan MKKS SMP tidak banyak membahas upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Agenda pertemuan berkisar pada pengelolaan administrasi sekolah. Terkait dana BOS, ketua MKKS beberapa kali mengingatkan bahwa sebagian dana bisa dialokasikan untuk membiayai peningkatan kapasitas guru agar, setidaknya, para guru berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP. Namun, sejauh ini belum banyak kepala sekolah yang melaksanakannya. “Kepala sekolah memang memegang kuasa penuh atas penggunaan dana BOS karena dia pejabat pengguna anggaran. Jadi, pembiayaan MGMP akan sangat tergantung pada komitmen kepala sekolah,” ujarnya.

Secara individual, beberapa guru lintas sekolah berinisiatif untuk berkumpul. Biasanya para guru berkumpul untuk berkonsultasi dalam menyusun PTK yang merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat. Selain itu, beberapa kali juga dilaksanakan kegiatan tutorial metode pembelajaran untuk beberapa mata pelajaran dengan tutor dari kalangan guru sendiri. Penggunaan media sosial antarguru maupun antarkepala sekolah tidak ditemukan di keempat sekolah studi. Kepemilikan akun media sosial hanya diakui oleh guru usia muda. Komunikasi antarguru senior lebih banyak menggunakan telepon atau SMS, selain tatap muka. Komunikasi dengan murid dan orang tua terbilang jarang menggunakan telepon/SMS, melainkan hanya mengandalkan tatap muka dan surat.

Di kalangan orang tua, berkomunikasi dengan guru melalui telepon bahkan dianggap tidak sopan. Mereka memilih untuk datang ke sekolah dan langsung menemui guru jika ada keperluan terkait anaknya di sekolah, misalnya untuk memberitahu bahwa anaknya tak bisa masuk sekolah karena sakit. Secara umum, komunikasi atau pertemuan antarpemangku kepentingan pendidikan dasar ternyata juga sangat jarang terjadi. Kalaupun pernah diselenggarakan, hasilnya tidak pernah diwujudkan secara operasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

III. ANALISIS INOVASI PEMBELAJARAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pada dasarnya, tidak ditemukan inovasi daerah di bidang pendidikan, khususnya pembelajaran, di Kabupaten Lombok Tengah. Hal yang kerap dimunculkan informan ketika ditanya tentang inovasi daerah adalah kegiatan membaca Alquran selama 15 menit setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Ungkapan “sebelum pelajaran dimulai” menunjukkan bahwa membaca Alquran bukan kegiatan belajar, apalagi dalam kenyataannya, mayoritas murid memang sudah bisa membaca Alquran. Agaknya kegiatan membaca Alquran lebih besar bertujuan mengharapkan berkah agar murid memperoleh kemudahan untuk memahami pelajaran setiap hari.

Asal mula kegiatan tersebut tidak jelas. Meskipun banyak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah menjalankan kegiatan membaca Alquran, tidak ditemukan regulasi daerah tentang hal itu. Banyak pihak mendukung kegiatan ini sebagai upaya untuk mendekatkan anak dengan kitab suci agamanya. Mereka diharapkan selalu ingat untuk membaca Alquran yang diyakini dapat mempertahankan akhlak yang baik ataupun memperbaiki akhlak. Sayangnya, sejauh ini belum ada inovasi selain membaca teks Alquran dan membaca terjemahan atau bahkan tafsirnya. Kalau saja inovasi semacam ini ada, banyak tujuan kegiatan pembelajaran yang bisa dicapai.

Ditemukan inovasi di tingkat sekolah, yaitu Pesantren Kilat melalui SMS. Kegiatan ini terjadi di sebuah SMP Negeri pada Tahun Ajaran 2011/2012 (lihat Kotak 1). Penggagasnya adalah kepala sekolah yang bersangkutan, tetapi, ketika dia dipindahtugaskan, kegiatan ini terhenti dan tidak ada yang melanjutkan, apalagi mengembangkannya. Tidak satu pun dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, UPTD, dan pejabat Dinas Dikpora tertarik untuk melanjutkan atau memfasilitasi kegiatan ini, padahal kegiatan ini memperoleh respons positif dari banyak pihak, khususnya orang tua murid, dan mereka menginginkan kegiatan ini dilanjutkan. Kegiatan ini juga pernah dipublikasikan koran lokal. Skema SMS ini membuat murid bisa menambah ilmu pengetahuan agama dan mengisi kegiatan harian mereka selama Ramadan dengan positif.

Pro-kontra penggunaan HP oleh murid. Mayoritas informan mengkhawatirkan dampak negatif penggunaan telepon genggam oleh murid. Kebanyakan sekolah melarang murid membawa telepon genggam ke sekolah. Berbagai kejadian kenakalan remaja selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan media sosial, khususnya telepon genggam. Namun, Kotak 1 menunjukkan bahwa telepon genggam ternyata bermanfaat dalam membangun komunikasi antarmurid dalam rangka pembelajaran. Telepon genggam adalah alat yang kebaikan atau keburukan penggunaannya tergantung sepenuhnya pada pemakai. Meskipun begitu, dukungan dari semua pihak yang relevan terkait upaya untuk meminimalisasi dampak negatif media sosial sangat diperlukan. Sebaliknya, penggunaan media sosial untuk tujuan positif harus diberi ruang untuk dikembangkan. Masih banyak komunitas yang mayoritas orang tua muridnya tidak mampu membantu anaknya belajar di rumah, baik karena pendidikan mereka yang rendah maupun karena pekerjaan yang mengharuskan mereka sering berada di luar rumah. Dalam konteks seperti itu, pengalaman seperti diceritakan pada Kotak 1 seharusnya dapat diperluas ke semua sekolah dan untuk berbagai mata pelajaran.

Kotak 1 **Pesantren Kilat Melalui SMS**

Menjelang puasa Ramadan, kepala sekolah sebuah SMP di Kabupaten Lombok Tengah memberitahukan kepada murid nomor telepon genggam guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Dia mempersilakan murid untuk mengajukan pertanyaan apa saja tentang agama Islam, khususnya mengenai puasa, melalui SMS. Tanpa diduga, ternyata setiap hari ratusan SMS diterima guru PAI. Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan murid beragam, baik yang serius maupun yang sederhana. Sebagai contoh, ada murid yang hanya menanyakan pukul berapa waktu untuk berbuka puasa pada hari tertentu. Meskipun semua pertanyaan bisa dijawab, guru tersebut mengatakan bahwa dia kewalahan menjawab SMS murid-muridnya.

Beberapa warga mengomentari bahwa hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keinginan anak muda untuk mempelajari agama tinggi. Mereka menilai bahwa kegiatan itu merupakan terobosan yang sangat bagus dalam membimbing anak pada proses belajar agama. Upaya ini perlu didukung oleh semua pihak. Pesantren kilat melalui SMS seperti ini harus diadakan lagi tahun depan.

Inovasi lain di tingkat sekolah adalah pelatihan pidato dalam bahasa Indonesia. Murid berlatih menggunakan bahasa Indonesia supaya terampil berbahasa dan meningkat kepercayaan dirinya. Kegiatan ini merupakan adopsi dari kebiasaan yang dilakukan di berbagai pesantren di Jawa. Di beberapa pesantren, pelatihan yang diberikan tidak hanya pidato dalam bahasa Indonesia, tetapi juga pidato dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pelatihan pidato dalam bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Tengah ini tidak didukung regulasi, tetapi dapat dilaksanakan dengan baik. Setiap minggu pada kegiatan upacara di sekolah, tiga anak bertugas masing-masing sebagai pembawa acara, pembaca pidato, dan pembaca doa. Kegiatan ini penting bagi murid karena mereka sehari-hari berbahasa Sasak, bahkan di kelas pun masih banyak guru yang menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa pengantar. Dalam upaya memperbaiki kemampuan murid dalam berbahasa Indonesia, salah satu SMP yang dikunjungi tengah merancang aturan yang mengharuskan guru dan murid menggunakan bahasa Indonesia di sekolah.

IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN: KETERTARIKAN DAN PENGARUH

4.1 Pengantar

Pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran murid, dalam studi ini dikategorikan menjadi (i) pembuat kebijakan, (ii) pelaksana kebijakan, dan (iii) pendukung pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, berdasarkan hubungan ketertarikan dan pengaruh terhadap hasil belajar murid, pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi (i) ketertarikan tinggi, pengaruh besar; (ii) ketertarikan rendah, pengaruh besar; (iii) ketertarikan tinggi, pengaruh kecil; dan (iv) ketertarikan rendah, pengaruh kecil. Bagian ini akan memberikan penekanan khusus pada beberapa pemangku kepentingan yang dianggap memiliki peran penting dalam menentukan hasil belajar murid.

4.2 Mutu Guru Penentu Mutu Pembelajaran

Guru menempati posisi tertinggi, baik dalam hal ketertarikan maupun pengaruh. Guru adalah pihak yang paling menentukan hasil belajar murid mengingat interaksi guru dan murid terjadi dalam intensitas tinggi setiap hari. Guru berperan signifikan dalam menentukan apakah seorang murid akan (i) menyukai aktivitas belajar-mengajar, (ii) memahami pelajaran yang diberikan, dan (iii) mampu mendapatkan hasil yang baik (berprestasi) serta menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari.

Mayoritas informan studi menyatakan bahwa mutu guru mencerminkan mutu pendidikan. Dengan kata lain, hasil belajar murid yang rendah disebabkan oleh mutu guru yang rendah. Dipandang dari sisi mengajar sebagai keterampilan dan pekerjaan guru sebagai profesi, masih banyak guru yang belum memiliki kemampuan mengajar dan komitmen yang memadai. Guru bermutu pun masih terkonsentrasi di sekolah yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Ketika ada pelatihan terkait peningkatan kemampuan mengajar, guru di sekolah pinggiran kerap kali tidak memperoleh atau terlambat menerima informasi. Seorang peserta FGD yang juga anggota organisasi guru menyebutkan bahwa pelatihan biasanya dihadiri oleh orang yang sama yang nomor teleponnya telah tersimpan di Dinas Dikpora.

Dalam dua wawancara terpisah dengan kelompok murid perempuan dan laki-laki kelas 9 di salah satu SMP, murid mengatakan bahwa mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena “pelajaran sulit dipahami, guru menerangkannya *muter-muter*, guru suka marah-marah.” Murid dalam kelompok umur lebih muda, yakni kelompok perempuan kelas 5, menyatakan bahwa guru yang mengajar dengan “menyenangkan, banyak senyum, banyak bercerita, tidak suka marah” membuat mereka menyukai pelajarannya. Jadi, meskipun mungkin hasil yang seorang murid peroleh ketika mengikuti pelajaran dengan cara yang menyenangkan bukanlah hasil terbaik, paling tidak murid tidak membenci pelajaran dan masih mungkin merasakan manfaat pelajaran tersebut.

4.3 Peran Kepala Sekolah sebagai Pembina Guru

Sebagai atasan langsung, kepala sekolah mempunyai peran penting dalam menjaga dan menentukan mutu mengajar guru. Berkaitan dengan hal ini, Ketua MKKS Lombok Tengah

mengatakan, “Salah satu penyumbang hasil belajar murid yang rendah adalah komitmen kepala sekolah yang rendah.” Sebagai contoh, guru yang mengajar dengan kreatif tidak akan dapat mengembangkan metode pembelajaran ketika kepala sekolah tidak mempunyai visi untuk memajukan sekolah yang dikelolanya. Dalam konteks ini, penempatan dan perekrutan kepala sekolah perlu ditinjau ulang oleh Dinas Dikpora. Pengawas sekolah sebagai kepanjangan tangan Dinas Dikpora memiliki potensi untuk memberikan masukan kepada Dinas Dikpora mengenai manajemen sekolah yang perlu segera diperbaiki dan manajemen sekolah yang pola baiknya bisa direplikasi oleh sekolah lain.

Di antara pemangku kepentingan, tidak ada yang secara terbuka menyatakan tidak bisa terlibat dalam program. Pemangku kepentingan yang secara eksplisit menyatakan minatnya untuk terlibat adalah guru dan kepala sekolah. Semua guru menyatakan kebutuhan mereka untuk mendapatkan penyegaran metode pembelajaran melalui pelatihan agar bisa lebih efektif menyampaikan materi belajar. Guru menilai bahwa sejauh ini pemda dan sekolah kurang memfasilitasi peningkatan kapasitas mereka.

Para kepala sekolah menyampaikan kebutuhan yang sama seperti kebutuhan yang diungkapkan guru. Lebih jauh, mereka mengungkapkan masih terbatasnya media belajar sebagai alat bantu guru untuk meningkatkan pemahaman murid. Kalaupun media belajar diberikan, hal itu kerap tidak segera diikuti dengan pelatihan atau pemberian petunjuk cara penggunaannya. Alhasil, beberapa media belajar belum terpakai. Selain itu, kepala sekolah juga menyampaikan keterbatasan sarana penunjang belajar murid, seperti buku bacaan dan perpustakaan. Karena masih terbatasnya jumlah buku, di SD Tolot-tolot dan SMP A, contohnya, ruang perpustakaan akhirnya malah dipakai sebagai ruang kelas dan ruang guru.

4.4 Peran Dinas Dikpora sebagai Regulator Utama Pendidikan

Dengan kewenangan untuk mengawasi manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru, Dinas Dikpora memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pembelajaran murid. Dinas Dikpora memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan hasil pembelajaran, terutama pada sekolah reguler. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperbaiki situasi pendidikan dasar di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Dikpora dapat memaksimalkan perannya dengan, misalnya, mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk pelatihan guru secara teratur dan mendorong pemda untuk memprioritaskan anggaran perbaikan mutu pendidikan secara umum. Selain itu, Dinas Dikpora perlu konsisten dalam menegakkan regulasi tentang penempatan kepala sekolah dan guru tanpa pertimbangan “bisnis” dan politis (baca: pragmatis). Mutasi kepala sekolah dan guru secara besar-besaran pada akhir Maret 2016 mencerminkan sulitnya kepala sekolah dan guru untuk bersikap independen, dan hal itu mewakili situasi pendidikan yang sarat dengan nuansa politis. Membangun kebiasaan baik dalam KBM memerlukan waktu dan ketekunan. Upaya kepala sekolah dan guru yang memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan kebiasaan baik tersebut akan terganggu ketika perekrutan, penugasan, dan mutasi mereka dilakukan bukan atas dasar peningkatan mutu pendidikan, tetapi atas dasar alasan pragmatis.

Berbagai upaya pemangku kepentingan yang secara langsung bersentuhan dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar murid harus didukung oleh komitmen pemda. Bappeda Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan ketertarikan tinggi dengan adanya komitmen mereka untuk memastikan terjaganya mutu pendidikan. Komitmen ini sejalan dengan kewenangan Bappeda untuk mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan. Selain itu, komitmen untuk

menjaga mutu pendidikan juga disampaikan oleh DPRD melalui Komisi D. Alokasi 20% anggaran untuk pendidikan tetap diperjuangkan oleh DPRD. Dalam FGD tingkat kabupaten, perwakilan Komisi D menyampaikan bahwa DPRD akan menyusun peraturan untuk mengatur ruang kelas belajar. Membangun komitmen untuk memastikan bahwa hasil belajar murid baik juga menjadi perhatian sekretariat daerah.

Di tingkat pembuat kebijakan, Dinas Dikpora, Bappeda, dan DPRD menyatakan dukungannya untuk pelaksanaan perbaikan mutu pembelajaran murid. DPRD (Komisi D) mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah menghambat usulan yang disampaikan eksekutif jika usulan itu berkaitan dengan peningkatan mutu guru dan mutu pembelajaran. Sementara itu, Dinas Dikpora, khususnya bidang pendidikan dasar, lebih jauh menyatakan bahwa ada tiga pihak yang penting diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Untuk guru, kebutuhan utamanya adalah peningkatan penguasaan metode KBM. Untuk kepala sekolah, yang dipandang paling penting adalah peningkatan kapasitasnya dalam melakukan supervisi terhadap guru. Sementara itu, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengawas sekolah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi adalah peningkatan kapasitas untuk melakukan supervisi klinis, yaitu mengenali masalah dan mencari solusi yang tepat atas kegiatan pembelajaran.

4.5 Peran Kelompok Pendukung Pengembangan Pendidikan

Pemangku kepentingan lain seperti MKKS, Dewan Pendidikan, PGRI, dan ornop menyatakan perlunya intervensi lebih kuat untuk peningkatan mutu guru agar mutu pembelajaran murid juga meningkat. Selain melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas guru bisa dilakukan dengan menggiatkan MGMP/KKG. Berdasarkan analisis singkat atas publikasi beberapa media cetak serta media dalam jaringan (daring) di Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan FGD kabupaten, pers memiliki potensi pengaruh yang tinggi terhadap situasi pendidikan, meskipun ketertarikan mereka rendah. Ada ruang bagi pers untuk menyuarakan persoalan rendahnya hasil belajar murid. Meskipun ada wartawan yang hadir dalam FGD kabupaten, hingga akhir periode pengumpulan data, tim peneliti tidak berhasil mendapatkan konfirmasi dari perwakilan media mengenai ketertarikan dan pengaruh media tersebut.

PGRI sebagai organisasi guru, ornop, dan Dewan Pendidikan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap hasil belajar murid. Namun, pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan pendidikan tidak signifikan. Dewan Pendidikan memiliki ketertarikan tinggi terhadap mutu pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan menyatakan telah menyerahkan surat kepada pemda yang mengungkapkan keprihatinan mereka akan situasi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Dewan Pendidikan juga menyayangkan terjadinya mutasi kepala sekolah dan guru yang dilakukan bukan atas dasar pertimbangan profesional, melainkan karena kedekatan secara politis. Dewan Pendidikan juga meminta Dinas Dikpora untuk menegakkan peraturan tentang pengawas sekolah yang tidak rutin berkunjung ke sekolah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas guru juga dilakukan oleh ornop; salah satunya adalah Community Education NTB. Melalui kegiatan pendampingan bagi guru, organisasi peduli pendidikan ini melatih guru menulis karya ilmiah yang bermanfaat untuk kenaikan pangkat guru. Kegiatan ini menjadi salah satu jawaban atas minimnya pelatihan yang tersedia. Namun, cakupan kerja ornop masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan guru akan pelatihan keterampilan mengajar.

Kepala desa dan komite sekolah merupakan pemangku kepentingan dengan ketertarikan dan pengaruh yang rendah terhadap hasil belajar murid. Keterlibatan kepala desa dalam kegiatan sekolah terbatas pada acara seremonial seperti perayaan kelulusan. Keterlibatan kepala desa lebih banyak terjadi pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Penyebab terbesarnya adalah aturan penggunaan Dana Desa yang hanya memperbolehkan dana itu dipakai untuk PAUD. Komite sekolah baru muncul ketika ada kepentingan untuk memobilisasi orang tua murid.

4.6 Peran Masyarakat dan Wali Murid

Komitmen pemangku kepentingan tidak akan menghasilkan sesuatu jika masyarakat penerima manfaat pendidikan tidak meyakini bahwa pendidikan penting bagi mereka dan anak mereka. Wali murid sebagai pemangku kepentingan yang sebenarnya memiliki pengaruh cukup besar dalam upaya pembelajaran murid tidak tampak antusias mendukung pembelajaran anaknya. Berdasarkan wawancara kelompok bersama wali murid di masing-masing sekolah lokasi studi, secara umum mereka beranggapan sudah menyerahkan tanggung jawab pembelajaran anak kepada sekolah. Para wali murid tidak dapat menemani anak belajar karena sibuk bekerja dan merasa tidak mampu mengimbangi materi belajar anak dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Di sisi inilah tokoh agama/masyarakat memiliki peran penting karena masyarakat memiliki kedekatan dengan para tokoh tersebut. Secara sosiologis, masyarakat Lombok memiliki ketaatan kuat terhadap tokoh agama yang biasa dipanggil tuan guru. Ketua MKKS menjelaskan bahwa peran tuan guru dalam masyarakat Lombok sangat penting. Pemerintah bisa saja tidak diacuhkan oleh masyarakat, tetapi, kalau tuan guru sudah bicara, masyarakat pasti akan mendengar dan mematuhi. Tuan guru dalam kultur masyarakat Lombok dianggap sebagai sosok yang berkarisma dan sumber rujukan untuk setiap masalah masyarakat.

Tokoh agama juga berperan dalam menyuarakan kritik atas situasi pendidikan. Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh salah satu informan yang merupakan pengurus besar organisasi keagamaan yang juga memiliki lembaga pendidikan. Informan ini mengaku telah secara khusus menyampaikan kepada pemerintah masalah lemahnya fungsi pengawas sekolah terhadap manajemen sekolah dan mutu pengajaran guru. Informan juga menyampaikan bahwa situasi pendidikan dipengaruhi sikap “saling menunggu” di antara para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, aktor utama yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program pengembangan pembelajaran murid adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Mereka adalah pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab langsung dalam upaya pembelajaran murid. Selanjutnya, pihak-pihak seperti MKKS, Dewan Pendidikan, PGRI, dan ornop perlu juga dilibatkan untuk memperkaya fasilitas peningkatan pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kapasitas guru. Keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dengan pembuatan kebijakan, seperti Dinas Dikpora, Bappeda, dan DPRD, dibutuhkan untuk menjamin adanya kebijakan yang mendukung atau melindungi pelaksanaan program. Khusus mengenai orang tua murid, walaupun tidak menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran, mereka tetap perlu dilibatkan dengan cara diterapkannya strategi khusus guna menumbuhkan minat mereka untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran anak-anak mereka.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Sepuluh Isu Teratas Menurut Kelompok Pemangku Kepentingan

Kelompok Pembuat Kebijakan

Terdiri atas Dinas Dikpora, Bappeda, sekda, dan DPRD.

a) Akses ke sekolah sudah memadai

Hampir semua informan yang ditemui menyatakan bahwa ketersediaan sarana sekolah untuk tingkat pendidikan dasar di Lombok Tengah sudah memadai. Jumlah sekolah yang ada sudah bisa menampung semua anak usia sekolah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah sekolah yang mencapai jumlah 597 SD dan 146 SMP (negeri dan swasta, belum termasuk MI dan MTs). Dengan kondisi tersebut, Kabid Sosbud Bappeda menegaskan bahwa saat ini tak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka.

Menurut Kabid Dikdas Dikpora, masalah yang masih tertinggal di Lombok Tengah adalah akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Lombok Tengah masih terbatas. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar diberlakukannya pendidikan inklusif di Lombok Tengah sejak 2012. Sejauh ini, sebagaimana diakui oleh Kabid Dikdas Dikpora, penerapan pendidikan inklusif yang sudah berjalan penuh baru sebatas larangan untuk menolak murid di semua jenjang sekolah.

Di sisi lain, menjamurnya lembaga pendidikan di Lombok Tengah memunculkan masalah baru. Terjadi persaingan antarsekolah untuk mendapatkan murid. Anggota DPRD mengungkapkan bahwa akibat persaingan tersebut, sudah ada sekolah negeri yang ditutup karena tidak ada murid. Akhirnya, guru-guru dan kepala sekolah dipindahkan ke sekolah lain. Masalah ini menurutnya terkait juga dengan faktor perebutan pengaruh. Di Lombok Tengah katanya ada kecenderungan bahwa jika ada tuan guru baru di satu daerah, pasti di daerah tersebut didirikan sekolah. Rata-rata tuan guru yang baru pulang dari Mekah biasanya langsung mendirikan pondok pesantren.

b) Sarana penunjang untuk menjalankan pembelajaran kurang

Walaupun akses terhadap pendidikan dasar sudah terjamin dengan tercukupinya jumlah sekolah, di setiap sekolah tetap ada masalah terkait dengan ketersediaan sarana penunjang. Dinas Dikpora mengatakan bahwa belum semua sekolah terpenuhi kebutuhan ruang kelasnya. Untuk mendukung program literasi, belum semua sekolah memiliki buku yang lengkap sesuai dengan standar pelayanan minimal. "Kalau jumlahnya mungkin sudah mencukupi, tapi judulnya yang belum," kata Kabid Dikdas Dikpora. Untuk kepentingan itu, Dinas Dikpora dan Bappeda menyatakan terus melakukan koordinasi untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan buku di sekolah sesuai kemampuan dana, baik untuk buku sebagai bahan bacaan maupun koleksi perpustakaan.

c) Kualitas guru dalam melakukan pembelajaran rendah

Para pihak di tingkat pembuat kebijakan mengakui bahwa kualitas rata-rata para guru dalam melakukan pembelajaran masih rendah. Ada banyak hal yang melatarbelakangi rendahnya kualitas guru. Kabid Dikdas Dikpora menyebutkan lebih dari separuh guru di daerahnya belum berkualifikasi sarjana (S-1). Ia juga mengakui, dalam bahasa yang diplomatis, kemampuan para guru dalam menjalankan pembelajaran masih bervariasi. Berdasarkan data yang

disampaikannya, terdapat 45% guru SD dan 34% guru SMP yang sudah bersertifikasi. Itu pun nilai rata-ratanya masih di bawah standar nasional.

Kabid Sosbud Bappeda lebih tegas mengatakan bahwa ada banyak guru di daerahnya yang tidak kreatif dalam mengajar, bahkan sering mengabaikan pembelajaran di kelasnya karena sibuk mengejar tunjangan sertifikasi. "Guru-guru kita lebih banyak terlihat di bank untuk mengurus sertifikasi dibandingkan berada di dalam kelas," katanya.

Asda I Sekda secara lebih filosofis mengatakan bahwa guru-guru lebih sibuk mengejar 'angka' dan melupakan 'nilai'. Angka yang ia maksud adalah angka kelulusan, padahal menurutnya yang lebih penting adalah penanaman nilai kreativitas, penghargaan pada ekspresi murid, dan pembentukan kemampuan nalar murid melalui proses pembelajaran. "Angka bisa dibuat, tapi nilai butuh proses untuk membuatnya," tegasnya.

d) Pelatihan guru kurang

Para pemangku kepentingan di tingkat pembuat kebijakan juga sebenarnya mengakui bahwa salah satu penyebab rendahnya kualitas guru adalah kurangnya pelatihan, terutama dalam hal metodologi pembelajaran. Namun, sebagaimana diakui Kabid Dikdas Dikpora, anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan masih kurang, sementara kebutuhan pelatihan sangat besar, termasuk untuk melatih guru-guru yang nilai UKG-nya rendah.

Kurangnya anggaran ini juga membuat upaya untuk meningkatkan kapasitas guru dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif masih terbatas, padahal untuk bisa menjalankan pembelajaran bagi ABK di kelas masing-masing, setiap guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Sejauh ini, pemda baru bisa melatih lima orang guru reguler dan tahun ini berencana kembali memberangkatkan 14 orang guru untuk belajar pendidikan inklusif selama dua semester di Universitas Negeri Surabaya.

Menurut Kabid Dikdas Dikpora, secara umum kemampuan APBD Lombok Tengah memang masih terbatas. Dibandingkan dengan daerah lain di NTB, katanya, anggaran pendidikan berada di posisi keempat dari bawah. Dalam kaitan ini, Bappeda mengatakan selama didukung dengan data yang valid, Bappeda siap mendukung dengan menambah alokasi anggaran. Selama ini, kata Kabid Sosbud Bappeda, banyak usulan dari SKPD yang tidak disertai dengan data yang baik.

e) Peran pengawas sekolah dalam melakukan supervisi belum maksimal

Salah satu pihak yang berperan langsung dalam peningkatan kapasitas guru adalah pengawas sekolah. Dalam hubungannya dengan masalah kualitas guru, para pengawas sekolah dinilai masih belum melakukan supervisi akademik kepada guru dengan baik. Menurut Bappeda, kapasitas para pengawas sekolah di Lombok tengah masih rendah, padahal pengawas sekolah memegang peran penting dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran ketika hasil yang didapat masih dinilai kurang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dinas Dikpora, yang mencontohkan pengalaman penerapan K-13 oleh guru yang sudah dilatih, tetapi pengawas sekolahnya malah tidak tahu apa-apa. Selain itu, Bappeda juga mengakui bahwa rasio jumlah pengawas sekolah dan sekolah yang ada juga masih timpang.

f) Kualitas kepala sekolah dalam melakukan supervisi rendah

Selain pengawas sekolah, pihak lain yang juga memiliki hubungan langsung dalam peningkatan kapasitas guru adalah kepala sekolah. Dalam hal ini, lagi-lagi disampaikan bahwa kualitas para kepala sekolah dalam melakukan supervisi kelas masih terbilang rendah. Masih banyak kepala

sekolah yang masih belum menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan sekadar melakukan kegiatan kecil seperti berkeliling menengok proses pembelajaran yang dijalankan guru-gurunya di kelas pun jarang, padahal menurut Kadis Dikdas Dikpora, supervisi kelas merupakan upaya untuk mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan guru. Minimnya kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi membuat Dinas Dikpora juga kesulitan untuk mendapatkan data yang valid mengenai kondisi guru, sebagaimana dibutuhkan dalam perencanaan bersama Bappeda.

g) Penempatan guru dan kepala sekolah dipengaruhi pertimbangan politis

Persoalan yang melingkupi guru dan kepala sekolah makin rumit dengan masuknya unsur politik di dalamnya. Walau tidak mengakui secara eksplisit, informan Dinas Dikpora dan sekda mengakui bahwa kedekatan guru dengan lingkaran kekuasaan atau dukungan pada momen pemilihan kepala daerah memengaruhi proses mutasi di daerahnya. Setidaknya, dalam setahun atau dua tahun terjadi mutasi guru dan kepala sekolah. Hal ini, diakui Dinas Dikpora, tidak lepas dari kepentingan pada saat pemilu.

Kebijakan mutasi tersebut sedikit banyak berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Kabid Dikdas Dikpora menggambarkan bahwa sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi, Dinas Dikpora sudah menyelenggarakan pelatihan. Namun, karena kebijakan mutasi, kepala sekolah yang sudah dilatih dijadikan guru lagi. Kemudian, yang tadinya guru, diangkat menjadi kepala sekolah, padahal guru yang diangkat itu belum siap dan belum dilatih. Akhirnya, sebagaimana dipaparkan di atas, proses supervisi kelas yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah tak berjalan.

h) Penyebaran guru belum merata

Akibat dari proses mutasi tersebut, distribusi guru di Lombok Tengah jadi tidak merata. Menurut anggota DPRD, para guru lebih suka ditempatkan di perkotaan. Ia menduga, hal ini didasari oleh penilaian bahwa mengajar di kota lebih bergengsi ketimbang di perdesaan, padahal menurutnya, Lombok Tengah tidaklah terlampaui luas; setiap sudut wilayah juga sudah bisa diakses dengan baik. Akibatnya, sebagian sekolah di perdesaan mengalami kekurangan guru PNS. Bahkan, sebagaimana diakui Dinas Dikpora, ada beberapa sekolah yang guru berstatus PNS-nya hanya kepala sekolahnya saja.

Untuk memecahkan masalah ketidakmerataan ini, Dinas Dikpora sudah berupaya untuk melakukan penyebaran guru PNS, terutama untuk SD negeri. Namun, sejauh ini angka persebarannya baru antara 3–4 orang per sekolah. Artinya, kata Kabid Dikdas Dikpora, “berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), kami masih kekurangan sekitar lima orang guru.”

i) Minat baca guru rendah

Masih terkait dengan kualitas guru, sebagian pemangku kepentingan menyoroti rendahnya minat baca di kalangan guru. Kabid Dikdas Dikpora melihat bahwa dampaknya adalah minimnya kemampuan guru dalam mengajar murid membaca, menulis, dan berhitung.

Informan dari sekda melihat bahwa masalah ini menyebabkan keteladanan para pendidik di mata para murid menurun. Guru-guru yang menempuh pendidikan lanjutan pun dilihatnya lebih mengejar gelar pendidikan, bukan mengejar kualitas. “Yang penting menurut mereka adalah ijazah, bukan kepada pengetahuannya,” katanya.

j) Perhatian orang tua/wali murid kurang

Hal lain yang banyak disebut oleh para pemangku kebijakan dalam kelompok pembuat kebijakan ini adalah kurangnya perhatian orang tua pada pendidikan anaknya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Ada anak yang dititipkan kepada saudara atau neneknya karena orang tua bekerja menjadi TKI di luar negeri. Menurut Bappeda, fenomena pekerja TKI banyak terjadi di Lombok Tengah. Kalaupun orang tua bukan TKI, keduanya terlalu sibuk sehingga tak bisa menemani anaknya belajar di rumah.

Dalam konteks ini, informan dari sekda menyampaikan bahwa seharusnya dalam lingkungan anak itu dibangun rumah belajar. Dalam hal ini, masjid-masjid seharusnya menyediakan pojok belajar bagi anak, lalu dari sana bisa didatangkan guru privat. "Karena tempatnya di masjid, pengawasannya akan jadi lebih mudah. Orang tua bisa *plong*," katanya.

Kelompok Pelaksana Kebijakan

Terdiri atas dua kepala UPTD kecamatan, dua pengawas SD, dua pengawas SMP, dua kepala sekolah SD sampel, dua kepala sekolah SMP sampel, empat kelompok guru (masing-masing dua dari SD sampel dan dua SMP sampel), dan salah satu ketua yayasan pendidikan di Lombok Tengah.

a) Akses memadai, sekolah berebut murid

Senada dengan para pembuat kebijakan, para informan pelaksana kebijakan juga menyatakan bahwa aksesibilitas anak usia wajib belajar ke sekolah sudah terjamin dan jumlah sekolah sudah sangat memadai. Senada dengan ucapan informan Bappeda di atas, ketua MKKS juga mengatakan tak ada alasan bagi anak untuk tidak sekolah.

Namun, banyaknya jumlah sekolah malah menimbulkan masalah lain. Sebagian informan, terutama para kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir mulai terjadi gejala persaingan antarsekolah dalam mendapatkan murid baru. Hal ini terjadi karena lokasi antarsekolah berdekatan. Bahkan, salah seorang informan kepala sekolah mengungkapkan bahwa ada dua sekolah dengan tingkat yang sama berdiri hanya berseberangan jalan.

Dalam menghadapi persaingan ini, rata-rata sekolah berupaya untuk menarik minat para orang tua dengan cara memberikan fasilitas seragam sekolah gratis bagi murid baru. Tidak cuma satu, seragam yang diberikan gratis bahkan bisa mencapai tiga setel: seragam putih-merah/biru, batik/pramuka, dan olahraga. Iming-iming seragam gratis ini tidak selalu bisa menarik minat. Salah seorang kepala SMP menyampaikan bahwa ada SMP swasta yang hanya berhasil mendapat satu orang murid baru pada tahun ajaran ini.

Persaingan mendapatkan sebanyak-banyaknya murid ini tampaknya dilatarbelakangi kebutuhan pemasukan pembiayaan sekolah. Dengan adanya larangan memungut iuran sekolah kepada orang tua murid, satu-satunya sumber pendapatan sebagian besar sekolah adalah dana BOS. Dalam hal ini, karena bantuan dana BOS dihitung per murid, tak heran jika jumlah murid yang terdaftar di setiap sekolah akan menentukan jumlah pendapatan sekolah. Apalagi kebutuhan pembiayaan sekolah cukup besar, terutama untuk membayar honor para guru tidak tetap (GTT) yang tak lagi boleh dibiayai APBD.

b) Sarana penunjang untuk menjalankan pembelajaran kurang

Hampir semua informan pada kelompok pelaksana ini menyampaikan bahwa salah satu masalah yang mereka hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kurangnya sarana penunjang pembelajaran. Menurut salah seorang pengawas sekolah, sekitar 60-an sekolah di kecamatannya masih belum terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya. Kekurangan itu, sebagaimana disampaikan oleh para kepala sekolah, mencakup buku pelajaran, buku bacaan, sarana perpustakaan, media bantu belajar, dan ruang kelas dan kursi untuk para murid.

Kurangnya buku pelajaran di sekolah yang dikeluhkan oleh para guru, misalnya, membuat mereka kesulitan memberikan pelajaran di kelas dan pekerjaan rumah untuk dibawa pulang murid. Menurut mereka, idealnya satu anak memiliki satu buku pelajaran sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik. Kekurangan buku bacaan dan ketiadaan sarana perpustakaan juga disebut guru menyulitkan mereka dalam meningkatkan minat baca para murid. Menurut salah seorang pengawas sekolah, minat baca di kalangan guru pun masih rendah.

c) Kualitas guru melakukan pembelajaran rendah

Rendahnya kualitas guru juga diakui oleh para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan kepala UPTD. Salah seorang kepala UPTD dan sebagian besar kepala sekolah mengatakan bahwa pemahaman guru tentang rencana pembelajaran, pola, dan teknik dalam mengajar masih belum bagus. Salah seorang pengawas sekolah mengatakan bahwa rendahnya kualitas guru terlihat dari rendahnya komitmen mereka untuk secara benar melakukan pembelajaran bagi murid, selain dari belum mampunya guru menguasai KKM.

Pengawas sekolah yang lain menyampaikan bahwa rendahnya kualitas guru disebabkan oleh banyaknya perguruan tinggi yang minim mengajarkan didaktik metodik yang tuntas kepada mahasiswanya. "Produknya adalah guru-guru yang tak bisa mengajar dengan baik. Tapi mau bagaimana lagi, kita harus terima karena kita kekurangan guru," jelas informan sambil menyoroti banyaknya GTT yang diterima tanpa seleksi yang baik.

Selain itu, pemahaman dan inovasi guru terkait pembelajaran juga rendah—hal ini lagi-lagi merupakan imbas dari guru-guru lulusan perguruan tinggi tadi. Informan mencontohkan bahwa K-13 konsepnya bagus, tetapi karena guru-guru tidak terlalu paham, penerapan kurikulum tersebut tidak berjalan maksimal. Para pengawas sekolah senada mengatakan bahwa guru tidak menguasai kurikulum dan tidak menguasai cara menyusun rencana belajar. Bahkan, salah seorang pengawas sekolah juga mengatakan bahwa ada banyak guru yang tidak benar-benar mencintai profesinya. Buktinya, masalah pendidikan jarang sekali dibicarakan di kalangan guru di luar sekolah.

d) Rekomendasi pengawas sekolah tak dijalankan. Pengawas sekolah hanya supervisi, tak bisa intervensi

Pengawas sekolah merupakan pemangku kepentingan yang melakukan supervisi untuk membantu guru memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Temuan dari supervisi itu akan didiskusikan dengan para pengawas sekolah lain untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Dikpora sebagai temuan pengawasan. Temuan tersebut juga sekaligus menjadi bahan pertimbangan atau rujukan dalam memberikan saran kepada guru terkait pembelajaran.

Namun, menurut pengakuan pengawas sekolah, ada banyak guru yang tidak memanfaatkan kesempatan supervisi yang tersedia. Meskipun demikian, ada juga guru yang mau didampingi pengawas sekolah untuk membenahi masalah administrasi dan pengajaran. Namun lagi-lagi,

pengawas sekolah lain mengatakan bahwa saran yang mereka sampaikan kepada guru sering tidak dijalankan, padahal saran-saran tersebut akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid jika diterapkan oleh guru. Mereka yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan memiliki alasan personal, yakni mereka sudah mendekati masa pensiun alias sudah makin malas (melakukan perbaikan kualitas).

Di sisi lain, laporan hasil pengawasan juga sering kali tidak dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pendidikan. Salah seorang pengawas sekolah memberi contoh dalam penempatan kepala sekolah yang menurutnya *amburadul*. Ada kepala sekolah yang sudah dilaporkan bermasalah tetapi tetap ditempatkan di sekolah yang sama. Ada juga kepala sekolah yang terlalu lama menjabat di satu sekolah dan tidak dipindahtugaskan. Ada juga kepala sekolah yang digeser dari posisinya dan kemudian diangkat lagi. Menurutny, hal tersebut merupakan imbas politik usai pilkada.

Sementara itu, pengurus salah satu yayasan pendidikan di Lombok Tengah mengatakan bahwa situasi saat ini tidak seperti dulu saat pengawas sekolah tekun mendampingi guru dalam membenahi satuan pelajaran dan lain-lain, padahal latar belakang sebagai guru dan kepala sekolah seharusnya membuat pengawas sekolah lebih mudah berkoordinasi dengan para kepala sekolah dan tidak menemukan masalah saat menghadapi guru. Menurutny, hal ini juga disebabkan oleh jumlah pengawas sekolah yang tidak proposional dengan kebutuhan yang ada.

e) Pelatihan guru kurang

Para kepala sekolah dan guru seragam mengatakan kurangnya kesempatan bagi guru untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Menurut para kepala sekolah, pelatihan bagi guru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Namun, sayangnya kegiatan pelatihan tidak banyak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kalaupun ada, tidak semua guru bisa dilatih; sering kali hanya guru itu-itu saja yang mendapatkan pelatihan. Durasi pelatihan pun sangat pendek dan materinya tidak mendalam.

Para guru menambahkan bahwa hal yang mendesak untuk dilatihkan kepada mereka adalah penggunaan media bantu belajar. Beberapa kali sekolah mendapat bantuan (*dropping*) media bantu untuk berbagai mata pelajaran, tetapi karena tidak disertai dengan manual pemakaian atau pelatihan cara pemakaiannya, media bantu tersebut tak kunjung terpakai. Kalaupun terpakai, para guru mengatakan tidak maksimal karena lebih merupakan hasil coba-coba saja.

Harapan kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menyelenggarakan pelatihan bagi guru memang tinggi. Hal ini karena sampai saat ini pihak sekolah belum bisa banyak mengalokasikan anggarannya untuk peningkatan kapasitas guru-gurunya. Walaupun begitu, salah seorang pengawas sekolah menyampaikan kritik kepada guru-guru, terutama mereka yang sudah memperoleh tunjangan profesi (bersertifikat). Menurutny, guru selalu merasa pendapatan mereka kurang. Sertifikat dari sertifikasi guru dipakai para guru untuk mendapatkan pinjaman. Alih-alih menunjang profesionalitas, insentif profesi yang didapat malah membuat guru terjebak dalam lilitan utang.

f) Perhatian orang tua/wali murid kurang

Masalah yang juga banyak disebut oleh para pemangku kepentingan kategori ini adalah kurangnya dukungan dari orang tua untuk mendorong anak belajar di rumah. Kepala sekolah mengatakan bahwa orang tua sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan hasil pembelajaran anak-anaknya. Rata-rata latar belakang orang tua murid adalah buruh kasar, seperti buruh bangunan (laki-laki) dan tukang bata (perempuan). Sementara itu, kepala UPTD mengatakan

bahwa hampir separuh dari orang tua murid di tingkat satuan pendidikan dasar bekerja sebagai petani atau buruh tani. Dengan jenis pekerjaan tersebut, kesibukan orang tua akibat bekerja membuat mereka tidak tanggap terhadap masalah pembelajaran yang dialami oleh anak-anak mereka.

Kepala UPTD yang lain menegaskan bahwa minimnya perhatian orang tua kebanyakan memang dialami oleh anak-anak miskin yang tinggal di perdesaan. Bahkan menurutnya, banyak juga orang tua di desa-desa menjadi TKI di luar negeri, seperti Arab Saudi dan Malaysia. Anak kemudian dititipkan kepada nenek atau pamannya, yang juga sibuk bekerja atau tak bisa membimbing anak di rumah.

Pengurus salah satu yayasan pendidikan yang ditemui malah mengatakan bahwa masih banyak terdapat anak putus sekolah karena ikut membantu orang tuanya. Untuk mencegah hal itu, kepala salah satu SD dan para gurunya kerap mendatangi rumah murid untuk menemui orang tua mereka ketika ada murid yang tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama.

g) Penguasaan bahasa Indonesia rendah karena bahasa lokal masih digunakan di sekolah dan di rumah

Sehubungan dengan masalah pembelajaran, sebagian besar pemangku kepentingan mengakui masih rendahnya penguasaan bahasa Indonesia di kalangan murid. Hal ini dapat dilihat dari seringnya para murid mengalami kesulitan memahami soal cerita. Salah satu penyebabnya adalah bahwa murid belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah. Bahkan, para guru dan kepala sekolah mengakui sering kali terpaksa menggunakan bahasa lokal untuk menjelaskan materi pelajaran karena murid-murid tak kunjung mengerti ketika materi pelajaran dijelaskan dalam bahasa Indonesia.

Kondisi ini ditambah pula dengan minimnya penggunaan bahasa Indonesia oleh para murid dalam keseharian dengan sesama murid maupun dengan orang tua di rumah. Di sebagian sekolah, upaya mengatasi hal itu dilakukan dengan mengadakan kegiatan berpidato secara bergiliran bagi para murid di depan teman-temannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilekatkan pada pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk memupuk kepercayaan diri para murid dalam berceramah. Selain itu, kadang para guru tetap memaksakan penggunaan bahasa Indonesia di kelas. Seorang kepala sekolah bercerita bahwa ia pernah mendengar gurunya memarahi murid di kelas karena pertanyaan yang diajukan dengan bahasa Indonesia dijawab murid dengan bahasa lokal.

h) Murid mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran perkalian dan pembagian

Para guru dan kepala sekolah juga mengakui bahwa mata pelajaran Matematika termasuk pelajaran yang sulit untuk diajarkan kepada murid. Guru di salah satu SMP mengatakan bahwa perkalian dan pembagian masih agak sulit dipahami murid-muridnya, padahal materi ini seharusnya sudah dikuasai di tingkat SD. Menurut mereka, para murid takut dengan hafalan perkalian ketika mereka masih SD.

Menurut salah seorang pengawas sekolah, konsep pembagian telah disampaikan secara keliru selama ini. Seharusnya, untuk dapat menjalankan operasi pembagian, siswa harus paham betul tentang perkalian. Tampaknya hal ini dijadikan sebagai referensi oleh para guru di sekolahnya. Di SD yang dikunjungi, para guru mengatakan bahwa untuk membantu murid dalam memahami perkalian dan pembagian, guru meminta murid untuk menghafalkan perkalian keras-keras secara bergantian di kelas. Hasilnya, menurut mereka, memang 50% dari murid sudah hafal perkalian.

i) KKM tak tercapai, murid terpaksa dinaikkan/diluluskan

Rendahnya baik kapasitas guru maupun kemampuan murid dalam menangkap materi pelajaran menyebabkan kriteria ketuntasan minimum (KKM) tak tercapai. Alih-alih memberikan pelajaran tambahan atau menetapkan murid tinggal di kelas yang sama pada tahun ajaran berikutnya, terdapat banyak guru yang malah menaikkan atau meluluskan muridnya. Tentu saja hal ini menjadi beban tambahan bagi guru di tingkat berikutnya. Hal tersebut diungkapkan oleh para guru di salah satu SMP yang dikunjungi. Mereka sering mendapatkan murid yang belum lancar calistung. Para guru SD yang mengajar di kelas tinggi (4–6) juga mengeluhkan hal yang sama. Namun, mereka enggan menyalahkan rekan gurunya di kelas rendah (1–3) sehingga mereka lebih banyak menjatuhkan kesalahan kepada murid atau orang tua.

j) Guru belum menguasai prinsip dan metode pembelajaran pendidikan inklusif

Berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di Lombok Tengah, salah seorang pengawas sekolah mengatakan bahwa pendidikan yang inklusif masih sekadar gerakan, belum menyentuh pembelajaran bagi murid dengan kebutuhan khusus. Pasalnya, guru-guru belum dilatih dengan benar untuk menjalankan pendidikan inklusif.

Para guru dan kepala sekolah di salah satu SD bercerita bahwa di sekolahnya ada satu siswa tunarungu di kelas 5 yang terpaksa tidak mendapatkan perhatian sesuai kebutuhannya dari para guru. Sejak awal, pihak sekolah telah menolak untuk menerima siswa ini karena menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Namun, orang tua murid memaksa agar sekolah tetap memperbolehkan anaknya untuk bersekolah di sana. Sampai saat ini, murid tersebut masih rajin masuk kelas, tetapi kemampuan berbicaranya bermasalah. Pihak sekolah sekarang mengaku berada dalam posisi dilematis karena sebentar lagi murid tersebut akan naik kelas ke kelas 6, kelas terakhir sebelum kelulusan.

Kelompok Pendukung Kebijakan

Terdiri atas perwakilan LSM, Dewan Pendidikan, PGRI, ketua MKKS, dua kepala desa, dua ketua komite sekolah dari SD sampel, dua ketua komite sekolah dari SMP sampel, dan empat kelompok orang tua murid (masing-masing dua dari SD sampel dan dua SMP sampel).

a) Perhatian orang tua/wali murid kurang

Berdasarkan semua wawancara kelompok yang dilakukan, rata-rata orang tua tidak banyak memberi perhatian pada pelajaran anak-anaknya. Hal ini disebabkan beberapa hal: (i) kebanyakan orang tua murid merantau ke luar daerah untuk bekerja sebagai buruh atau tukang, atau ke luar negeri untuk menjadi TKI sehingga anak ditinggal kepada nenek/kakek mereka;¹ (ii) latar belakang pendidikan orang tua (atau kakek/nenek yang menjadi wali) murid yang sebagian besar hanya sebatas sekolah dasar sehingga banyak orang tua tak bisa mendampingi anak dalam belajar; dan (iii) orang tua di sebagian sekolah merasa tidak pernah diajak bicara atau diberi informasi oleh pihak sekolah menyangkut masalah atau perkembangan anak mereka di sekolah.

Selain itu, masih banyak orang tua menyerahkan urusan pembelajaran anak-anak mereka sepenuhnya kepada sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru-guru, padahal anak sering

¹Salah seorang kepala desa (kades) yang ditemui menyampaikan bahwa kira-kira 20% KK (bisa suami atau istrinya saja) di desanya merantau ke Arab Saudi atau Malaysia.

diberi pekerjaan rumah oleh para guru agar bisa dibimbing oleh para orang tua. Akibatnya, karena tidak ada perhatian dari orang tua, anak-anak pun belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah dengan temannya. Menurut para ketua komite sekolah, rendahnya kepedulian orang tua ini merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

b) Akses ke sekolah sudah memadai

Senada dengan pemangku kepentingan dari dua kelompok terdahulu, para informan dari kelompok ini juga mengatakan bahwa akses untuk bersekolah bagi anak-anak Lombok Tengah sudah cukup baik. Sekolah-sekolah sudah banyak diperbaiki. Para orang tua murid dari setiap sekolah yang dikunjungi juga mengakui bahwa fisik bangunan sekolah sudah makin baik. Dengan kondisi ini, mengutip kalimat ketua MKKS, "Tidak ada alasan untuk tidak sekolah."

Seiring dengan itu, sebagaimana diakui ketua komite sekolah dan para orang tua murid, kesadaran orang tua untuk pendidikan juga makin meningkat. Ketua komite sekolah salah satu SMP menjelaskan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mulai meningkat setelah sektor pariwisata Kabupaten Lombok Tengah berkembang. Banyak orang tua mengarahkan anak untuk bersekolah di SMK agar bisa bekerja di sektor pariwisata.

c) Sarana penunjang untuk menjalankan pembelajaran kurang

Masalah kurangnya sarana penunjang pembelajaran juga disampaikan oleh kelompok informan ini. Para orang tua murid terutama menyoroti kurangnya buku di sekolah, baik buku paket maupun buku bacaan. Mereka melihat bahwa anak-anaknya tidak pernah membawa buku paket ke rumah sebagaimana biasanya jika diberi PR oleh gurunya. Alhasil, setiap pulang sekolah, anak langsung bermain karena tak pernah diberi PR.

Sementara itu, komite sekolah lebih melihat kurangnya sarana fisik sekolah, seperti belum adanya ruang komputer, masih terbatasnya ruang kelas, dan belum adanya fasilitas ruangan dan peralatan untuk aktivitas ekstrakurikuler murid. Komite sekolah menganggap bahwa jika di sekolah diselenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, murid akan lebih kreatif dan terhindar dari perilaku negatif.

d) Kesenjangan kualitas sekolah

Tidak meratanya fasilitas yang tersedia di tiap sekolah menjadi salah satu faktor penyebab senjangnya pencapaian mutu. Ketua Dewan Pendidikan menjelaskan bahwa ada sekolah bagus yang prestasinya sudah mencapai tingkat nasional atau provinsi, tetapi ada juga sekolah yang masih memprihatinkan karena masih kekurangan bahan bantu mengajar (BBM).

Akibat dari kesenjangan ini, menurut ketua Dewan Pendidikan, muncul persepsi dalam masyarakat tentang sekolah favorit dan nonfavorit. Banyak orang tua menyekolahkan anak di sekolah favorit. Walaupun sudah diberlakukan pembatasan murid di tiap sekolah, terdapat banyak orang tua yang masih bersikeras agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit. Akibatnya, murid-murid berkumpul di sekolah favorit, padahal masih banyak terdapat sekolah yang kekurangan murid.

Persepsi mengenai pemilahan sekolah ini tidak hanya terjadi di kalangan orang tua. Aktivis ornop mengatakan bahwa fenomena itu juga terjadi di kalangan guru. Guru-guru merasa bangga jika mereka bisa mengajar di sekolah favorit. Akibatnya, distribusi guru menjadi tidak merata. Guru-guru berkualitas berkumpul juga di sekolah-sekolah favorit karena sekolah semacam ini lebih

terjamin pembiayaannya dengan jumlah murid yang banyak. Ketua MKKS juga mengaku bahwa pembelajaran murid yang rendah memang masih terjadi, terutama di daerah-daerah pinggiran.

e) Kurangnya minat belajar guru

Ketua MKKS menyampaikan bahwa berlakunya UU Guru dan Dosen sudah memberi pengakuan terhadap guru sebagai profesi. Namun, hal ini belum diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas diri di kalangan guru. Ia mengungkapkan bahwa para guru selama ini lebih banyak menunggu fasilitasi dari sekolah atau pemerintah dalam peningkatan kapasitasnya. Hal ini terjadi tidak hanya pada guru GTT atau PNS biasa, tetapi juga di kalangan guru yang sudah memperoleh tunjangan sertifikasi, padahal kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelatihan bagi guru masih terbatas. Selain itu, menurut pandangannya, guru yang sudah mengantongi sertifikat mestinya bisa menyisihkan dana dari tunjangan yang ia dapat karena tunjangan itu pada dasarnya adalah insentif untuk menunjang peningkatan profesionalisme guru.

Dalam kaitan ini, Dewan Pendidikan melihat bahwa perubahan pola pikir guru merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan. Salah satu hal krusial untuk diselesaikan adalah kemauan untuk belajar dan meningkatkan kapasitas profesional guru. Dewan Pendidikan dan MKKS memiliki pandangan yang sama bahwa minat baca di kalangan guru masih kurang. Akibatnya, menurut ketua MKKS, guru yang mampu menjalankan tugas pembelajaran dengan baik tidak banyak. Guru yang kurang membaca tidak memiliki kemampuan menjelaskan yang bagus dan inovatif. Akhirnya, ketertarikan anak didik untuk belajar menjadi berkurang sehingga hasil belajarnya menurun. Indikatornya terlihat pada hasil ujian nasional di Lombok Tengah yang trennya menurun.

Rendahnya kualitas guru dicontohkan oleh pengurus PGRI yang mengatakan bahwa pelajaran Matematika masih menjadi momok dan dicitrakan sebagai pelajaran yang sulit oleh guru sendiri. Akhirnya, pengetahuan murid tentang pelajaran Matematika masih pada tingkat menghafal dan mengingat, belum meningkat ke tahap kemampuan menganalisis. Selain itu, penguasaan bahasa Indonesia masih kurang karena pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas kerap masih disampaikan dengan menggunakan bahasa lokal.

f) Sarana peningkatan kapasitas guru kurang tersedia (pelatihan kurang, MGMP/KKG tidak aktif)

Masih banyak kepala sekolah kurang peduli terhadap peningkatan kapasitas para guru. MGMP/KKG sebagai sarana bagi guru untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tidak berjalan rutin, padahal menurut ketua MKKS, kegiatan MGMP/KKG sangat penting karena kelebihan dan kelemahan guru bisa dievaluasi melalui MGMP/KKG. Namun, sejauh ini masih banyak kepala sekolah tidak menganggarkan dana untuk kegiatan MGMP/KKG bagi para gurunya.

Aktivis ornop yang ditemui juga berpandangan bahwa guru seperti dibiarkan berjalan sendiri. Banyak guru mengalami kesulitan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) salah satunya karena tidak aktifnya MGMP/KKG. Dalam menjalankan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang menjadi syarat kenaikan pangkat, banyak guru tidak dibimbing. Akibatnya, banyak guru mengambil jalan pintas. Dengan modal berselancar di internet, mereka menjiplak contoh yang mereka temukan dengan hanya mengganti judul, nama sekolah, lokasi, dan seterusnya.

Dalam kaitan itu, PGRI Lombok Tengah menyatakan sudah memfasilitasi guru dengan mengadakan forum ilmiah guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru. Namun, itu pun tidak dilaksanakan secara rutin.

g) Anak putus sekolah

Walaupun akses ke sekolah sudah terhitung memadai, anak yang putus sekolah di Lombok Tengah terhitung masih banyak. Menurut ketua MKKS, kasus anak putus sekolah ini banyak terjadi di pelosok-pelosok. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah seorang kades menyampaikan bahwa di desanya anak-anak putus sekolah di usia 8–10 tahun karena bekerja menjadi buruh tani bersama nenek dan kakek mereka, sementara orang tua mereka merantau ke tempat lain untuk bekerja.

Penyebab lainnya adalah pernikahan dini. Menurut ketua Dewan Pendidikan, faktor penyebabnya adalah karena orang tua bercerai atau terlalu sibuk bekerja, atau memang karena kemauan anaknya sendiri. Menurut para pemangku kepentingan yang ditemui, maraknya pernikahan dini di Lombok Tengah terjadi karena masih banyaknya warga yang mempertahankan budaya *merariq*, yaitu pernikahan yang didahului dengan penculikan calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki. Aktivis ornop yang ditemui menjelaskan bahwa jika proses tersebut dihentikan, maka keluarga pihak laki-laki harus membayar denda dan keluarga perempuan akan menanggung malu.

h) Bahaya dampak negatif teknologi (*game*/permainan, TV)

Isu lain yang banyak diungkap oleh para pemangku kepentingan adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi (*game*, internet, TV). Salah satu ketua komite sekolah menyampaikan bahwa masalah dan tantangan pendidikan sekarang adalah terkait dengan efek buruk teknologi terhadap akhlak anak-anak. Tidak ada sistem kontrol dari lingkungan atau orang tua sehingga teknologi tidak dimanfaatkan secara positif. Ketua komite sekolah yang lain mengatakan bahwa kecanduan anak bermain *playstation* menjadi penyebab rendahnya hasil pembelajaran siswa.

Lebih jauh, aktivis ornop mengungkapkan efek negatif perkembangan teknologi terhadap perilaku seksual anak. Ia pernah mendapatkan telepon genggam salah seorang muridnya yang penuh dengan koleksi gambar/video porno. Beberapa kali pula ia harus menangani kasus perlecehan seksual yang dilakukan sesama murid.

i) Kurangnya pelajaran tambahan bagi murid

Sebagian orang tua menyampaikan harapannya agar sekolah bisa memfasilitasi pelajaran tambahan bagi anak-anaknya. Dalam wawancara kelompok dengan orang tua di salah satu sekolah, para orang tua mengeluhkan bahwa anak-anak mereka hampir tidak pernah membawa pulang PR sehingga anak-anak hanya bermain sepulang sekolah. Pelajaran tambahan diharapkan bisa mengisi kekosongan PR tersebut.

Pemberian pelajaran tambahan diutamakan untuk pelajaran-pelajaran penting yang banyak tidak dikuasai murid. Selain itu, salah seorang ketua komite sekolah menginginkan diselenggarakannya kursus bahasa Inggris untuk para murid di sekolahnya. Menurutnya, kemampuan bahasa Inggris penting diberikan kepada murid mengingat perkembangan dunia pariwisata yang makin pesat di Lombok Tengah.

LAMPIRAN 2

Ringkasan Metode Komunikasi Menurut Kelompok Pemangku Kepentingan

a) Kelompok Pembuat Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon, SMS

Di tingkat Dinas Dikpora, sejauh ini komunikasi lebih banyak mengandalkan metode tatap muka, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan, atau pertemuan langsung di kantor. Kabid Dikdas Dikpora mengaku setiap bulan melaksanakan rakor dengan seluruh UPTD di kantor Dinas Dikpora. Rapat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan dan pembahasan pelaksanaannya di sekolah. Biasanya, UPTD kemudian akan meneruskan informasi yang diperoleh dari kabupaten dengan melaksanakan rakor di tingkat kecamatan bersama para kepala sekolah di wilayahnya masing-masing. Di kalangan UPTD juga ada forum UPTD, yang dalam pertemuannya kadang mengundang Dinas Dikpora.

Dalam kaitan ini, media komunikasi digunakan sebatas untuk mengundang para peserta rapat. Metodenya adalah dengan menelepon langsung atau mengirim SMS. Mengundang peserta rapat melalui surat memang sudah mulai ditinggalkan, dengan catatan surat resmi tetap dibuat dan diambil peserta saat rapat diselenggarakan. Jika ada kebutuhan mendadak, telepon dan SMS juga biasa digunakan untuk menyepakati janji bertemu. Hal ini dilakukan dalam komunikasi Dinas Dikpora dengan para pelaku di semua tingkat di bawahnya.

Komunikasi horizontal antara Dinas Dikpora dan Dewan Pendidikan, DPRD kabupaten, atau SKPD lain dilakukan dengan menggunakan surat resmi dan tatap muka. Hanya dalam hal tertentu, seperti konfirmasi rencana pertemuan atau hal mendesak terkait pelaksanaan kebijakan, komunikasi dilakukan melalui telepon.

Kabid Dikdas Dikpora juga mengaku kerap menerima telepon atau SMS dari orang tua murid. Namun, komunikasi tersebut sebatas keluhan atas naiknya harga seragam sekolah, dana BOS yang dibagi rata (dengan murid lain), dan sebagainya. “Belum ada orang tua yang mengeluh atau bertanya soal proses belajar mengajar anaknya di sekolah,” tegasnya.

Namun, penggunaan sarana komunikasi yang lebih maju, seperti grup WhatsApp atau Facebook, belum berjalan. Salah satu faktornya adalah karena masih banyak pemangku kepentingan yang belum memiliki atau belum mampu menggunakan aplikasi media sosial *smartphone* (telepon pintar). Gejala ini terutama tampak pada pemangku kepentingan yang sudah berumur. Mereka umumnya beranggapan bahwa media komunikasi “tradisional” seperti telepon dan SMS sudah cukup untuk berkomunikasi. Selain itu, tampaknya aplikasi media sosial masih dipandang “tidak pantas” untuk digunakan sebagai media komunikasi antarpemangku kepentingan. “Itu kan untuk anak-anak. Saya sendiri pakai WhatsApp karena dipaksa anak saya,” kata salah satu kepala UPTD.

b) Kelompok Pelaksana Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon, SMS

Selain di kalangan pejabat struktural, rakor yang rutin dilakukan setiap bulan juga dilakukan di kalangan pengawas sekolah, baik pengawas SMP di tingkat kabupaten maupun pengawas SD di

tingkat kecamatan. Agenda yang dibicarakan sebatas pertukaran informasi mengenai pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah dan kebijakan terbaru.

Dengan alasan yang sama seperti di atas, komunikasi antarpengawas sekolah juga belum menggunakan aplikasi media sosial. Telepon dan SMS dianggap masih cukup sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, baik di antara mereka maupun dengan para kepala sekolah dan guru yang ada dalam lingkup kerjanya.

Sementara itu, para kepala sekolah (negeri dan swasta) di masing-masing tingkat menjalin komunikasi melalui forum MKKS/K3S. Di tingkat SMP, ruang lingkup forum MKKS langsung di kabupaten, sedangkan K3S tingkat SD dijalankan di lingkup gugus (terdiri atas sekitar tujuh sekolah dalam satu kecamatan). Hanya MKKS SMP mengaku secara rutin melakukan pertemuan tiap bulan yang dilaksanakan bergiliran di setiap sekolah. Untuk tingkat SD, K3S tidak secara rutin melaksanakan pertemuan. Jika pun ada pertemuan, biasanya pertemuan tersebut diadakan di sekolah inti gugus, yang biasanya membahas persiapan ujian sekolah/nasional.

Penggunaan media sosial di kalangan guru dan kepala sekolah tidak ditemukan di keempat sekolah studi. Kepemilikan akun media sosial hanya diakui oleh guru usia muda, sementara guru yang masuk dalam kelompok senior mengaku tak pernah mengenal media sosial. Mereka lebih banyak berkomunikasi dengan menggunakan telepon atau SMS, selain tatap muka secara langsung. Bagi guru yang sudah memiliki akun media sosial, sarana ini hanya digunakan untuk perbincangan masalah keseharian, bukan masalah pekerjaan atau pembelajaran. Komunikasi dengan murid dan orang tua/wali murid malah terbilang jarang menggunakan telepon/SMS; mereka hanya mengandalkan tatap muka atau surat.

Namun, di satu sekolah studi (SMP B), guru mengaku bahwa beberapa muridnya pernah mengirim pesan melalui kotal masuk pesan (*inbox*) Facebook. Hanya saja, mereka mengatakan bahwa para muridnya sendiri terbilang jarang aktif di media sosial tersebut. "Facebooknya aktif kalau di rumah saja karena di sekolah dan pondok ada aturan yang melarang menggunakan telepon genggam. Itu pun hanya kalau pulsa/paketnya masih ada. Kadang sebulan dia tidak aktif karena paketnya sudah habis," kata salah seorang guru dalam wawancara kelompok.

c) Kelompok Pendukung Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon, SMS, grup WhatsApp (terbatas)

Walau dilaksanakan rutin, pertemuan MKKS SMP tidak banyak membahas hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Hal yang biasa menjadi agenda pertemuan rutin MKKS hanya berkisar pada pengelolaan administrasi sekolah, seperti alokasi penggunaan dana BOS berikut penyusunan laporannya. Terkait hal ini, ketua MKKS mengaku sudah beberapa kali mengingatkan para koleganya bahwa sebagian dana BOS bisa dialokasikan untuk membiayai peningkatan kapasitas guru, setidaknya bagi mereka untuk bisa aktif dalam MGMP. Namun, sejauh ini belum banyak kepala sekolah yang melaksanakannya. "Kepala sekolah memang memegang kuasa penuh atas penggunaan dana BOS karena dia pejabat pengguna anggaran. Jadi, pembiayaan MGMP akan sangat tergantung pada komitmen kepala sekolah," ujarnya.

Di kalangan guru, forum sejenis berupa MGMP (SMP) dan KKG (SD) bisa dikatakan vakum. Kalau pun ada kegiatan, ruang lingkungannya hanya sebatas internal sekolah, seperti MGMP di SMPN 1 Praya, tempat ketua MKKS bertugas, sedangkan KKG di tingkat SD hanya mengadakan pertemuan menjelang ujian, dengan agenda pembagian tugas membuat soal untuk tiap mata pelajaran bagi para guru dalam satu gugus. Pertemuan KKG/MGMP antar sekolah yang bertujuan berbagi informasi dan pengalaman sudah lama tak dilaksanakan. "Dulu pernah aktif sewaktu ada bantuan

program dari Jerman. Setelah program selesai, pertemuan juga tak ada lagi,” kata salah seorang guru.

Namun, secara individual beberapa guru lintas sekolah melakukan inisiatif untuk berkumpul. Menurut penjelasan tokoh pemerhati pendidikan yang juga penggagas Education Community di Lombok Tengah, biasanya mereka berkumpul untuk berkonsultasi dalam penyusunan PTK yang merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS. Selain itu, beberapa kali juga dilaksanakan kegiatan tutorial metode pembelajaran untuk beberapa mata pelajaran dengan tutor dari kalangan guru sendiri.

Di kalangan orang tua, bahkan masih ada yang beranggapan bahwa berkomunikasi dengan guru dengan menggunakan telepon termasuk tidak sopan. Mereka memilih untuk datang ke sekolah untuk langsung menemui guru jika ada keperluan terkait anaknya di sekolah, misalnya untuk memberitahu bahwa anaknya tak bisa masuk sekolah karena sakit.

Hal berbeda tampaknya terjadi di kalangan orang tua SMP di perkotaan. Di sekolah yang dipimpinnya (SMPN 1 Praya), ketua MKKS menyampaikan bahwa orang tua/wali murid di beberapa kelas sudah menggunakan grup WhatsApp sebagai media pertukaran informasi. Namun, grup tersebut hanya beranggotakan orang tua/wali murid saja; guru belum bergabung.

Lebih umum, komunikasi atau pertemuan antarpemangku kepentingan pendidikan dasar ternyata juga sangat jarang terjadi. Jika pun pernah diselenggarakan, hasil pertemuan tersebut tak pernah diwujudkan secara operasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran di Lombok Tengah.

d) Kelompok Sasaran Kebijakan

Metode komunikasi: tatap muka, telepon

Murid-murid SD di Lombok Tengah hanya menggunakan tipe komunikasi langsung dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan lain. Komunikasi secara lisan melalui tatap muka dilakukan dengan para guru dalam kegiatan belajar di sekolah. Hal yang sama juga dilakukan ketika mereka belajar secara berkelompok. Biasanya kegiatan belajar secara berkelompok ini dilakukan di rumah salah seorang murid.

Di tingkat SMP, murid-murid sudah mulai menggunakan tipe komunikasi yang beragam. Komunikasi langsung secara lisan melalui tatap muka dengan para guru dan teman sekolah tetap menjadi tipe dan saluran komunikasi utama. Selain itu, murid-murid menggunakan tipe komunikasi tidak langsung melalui SMS, suara dengan telepon seluler, dan media sosial. Komunikasi melalui SMS dan telepon biasanya digunakan untuk menghubungi teman guna bertanya mengenai pekerjaan rumah yang diberikan guru.

Komunikasi tidak langsung dengan menggunakan media sosial Facebook digunakan oleh sebagian murid untuk bertanya kepada guru via *inbox*. Namun, komunikasi melalui media sosial hanya ditemukan di satu SMP. Selain itu, menurut penjelasan para guru, komunikasi ini pun tidak berjalan secara simultan karena murid sering kali kehabisan paket data.

LAMPIRAN 3

Tabel A1. Daftar Mitra Potensial di Daerah

INFORMAN WAWANCARA MENDALAM

No.	INSTANSI	JABATAN
1	Dinas Dikpora Lombok Tengah	Kabid Dikdas
2	Dinas Dikpora Lombok Tengah	Pengawas SMP
3	Dinas Dikpora Lombok Tengah	Pengawas SMP
4	Bappeda Lombok Tengah	Kabid Sosbud
5	Sekretariat Daerah Loteng	Asda I Kabupaten Loteng
6	SMPN 1 Janapria	Ketua MKKS Loteng
7	Education Community (ornop)	Ketua
8	Dewan Pendidikan Loteng	Ketua
9	PGRI Lombok Tengah	Sekretaris
10	DPRD Lombok Tengah	Anggota Komisi IV
11	UPTD Kecamatan Jonggat	Kepala UPT
12	UPTD Kecamatan Jonggat	Pengawas TK/SD
13	UPTD Kecamatan Jonggat	Pengawas TK/SD
14	UPTD Kecamatan Pujut	Kepala UPT
15	UPTD Kecamatan Pujut	Pengawas TK/SD
16	SMP A	Kepala sekolah
17	SMP A	Ketua komite sekolah
18	Yayasan Pendidikan NU Al-Manshuriyah	Ketua
19	SMP B	Kepala sekolah
20	SMP B	Ketua komite sekolah
21	SDN A	Kepala sekolah
22	SDN A	Ketua komite sekolah
23	Desa 1	Kepala desa
24	SDN B	Kepala sekolah
25	SDN B	Ketua komite sekolah
26	Desa 2	Kepala desa

PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

No.	INSTANSI	JABATAN
1	Sekretariat Daerah Loteng	Asda I Kabupaten Loteng
2	Dinas Dikpora Lombok Tengah	Kabid Dikdas
3	DPRD Lombok Tengah	Anggota Komisi IV
4	UPTD Kecamatan Praya Barat	Pengawas TK/SD
5	UPTD Kecamatan Pujut	Pengawas TK/SD
6	Education Community (ornop)	Ketua
7	SMPN 1 Janapria	Ketua MKKS
8	Dinas Dikpora Lombok Tengah	Pengawas SMP

No.	INSTANSI	JABATAN
9	Dewan Pendidikan Loteng	Ketua
10	PGRI Lombok Tengah	Sekretaris
11	Asosiasi GTT/PTT	-
12	Asosiasi GTT/PTT	-
13	Asosiasi GTT/PTT	-
14	Nahdlatul Ulama (NU) Loteng	Aktivis
15	Bappeda Lombok Tengah	Kabid Sosbud
16	Nahdlatul Wathon (NW) Loteng	Aktivis
17	lombokita.com	Wartawan

LAMPIRAN 4

Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Kelompok pembuat kebijakan				
Kabid Dikdas Dinas Dikpora Lombok Tengah	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Memang bidang informan dan lembaga. Informan memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, sampai menjadi Kabid Pendidikan Menengah dan sekarang Kabid Pendidikan Dasar.</p>	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Memang bidang informan dan lembaga. Di samping kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan melalui dinas sesuai tupoksinya, informan terlibat secara penuh dalam inisiasi program yang datang dari luar, seperti program Education for All.</p>	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Informan memang tidak memiliki pengaruh langsung pada pembelajaran. Namun, sejauh tupoksinya, informan sudah melakukan beberapa pembenahan, di antaranya mengupayakan ketersebaran guru lebih merata, menyelenggarakan pelatihan bagi guru yang nilai UKG-nya rendah, menginisiasi dan menjalankan program pendidikan inklusif melalui berbagai kegiatan.</p>	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Posisi informan strategis sebagai pejabat yang membidangi pendidikan dasar di daerahnya [rumornya, informan merupakan calon kadis]</p>
Kabid Sosbud Bappeda Lombok Tengah	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Informan sebagai lembaga siap mendukung penganggaran asalkan data proposal jelas. Hubungan dengan Kabid Dikdas Dikpora juga tampaknya cukup baik.</p>	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Informan sebagai lembaga siap mendukung penganggaran asalkan data proposal jelas.</p>	<p><u>Menengah</u></p> <p>Alasan: Sejauh ini perhatian informan masih sebatas pembangunan fisik. Faktanya, di dua–tiga tahun terakhir, jumlah sekolah di Loteng meningkat tajam. Walau begitu, pengaruhnya tampak ketika ia membuat kebijakan untuk membatasi pembangunan sekolah di kota-kota; pembangunan harus dikonsentrasikan di desa-desa. Proposal yang diloloskan hanya untuk pemeliharaan/renovasi RKB.</p>	<p><u>Tinggi</u></p> <p>Alasan: Memegang peranan dalam penganggaran terkait pendidikan. Sebagai Kabid Sosbud Bappeda, informan memiliki kewenangan untuk menentukan (termasuk mengoreksi usulan dari Dinas Dikpora) kegiatan/program yang menjadi prioritas di sektor pendidikan.</p>

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Asisten I Sekda Kabupaten Lombok Tengah	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan pernah lama menjabat sebagai Kepala Bappeda dan kemudian Kepala Dinas Dikpora. Informan juga memiliki perhatian yang tinggi atas kemajuan pendidikan di wilayahnya. Selain itu, pada saat FGD, para peserta juga ramai menyampaikan bahwa informan merupakan salah satu kandidat sekda.	<u>Tinggi</u> Alasan: Saat menjadi Kepala Bappeda dan kemudian Kepala Dinas Dikpora, informan menunjukkan keseriusannya dengan membuat pemetaan masalah terkait dengan rendahnya IPM Lombok Tengah.	<u>Menengah</u> Alasan: Walaupun pernah menduduki jabatan strategis yang bisa memengaruhi sektor pendidikan secara langsung dan tidak langsung, informan mengakui pengaruh politik dalam penetapan kebijakan pendidikan di daerahnya masih lebih besar.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki perhatian yang tinggi pada dunia pendidikan dan ia adalah salah satu kandidat sekda di periode kedua bupati terpilih ini.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan sudah dua periode menjadi anggota DPRD Komisi IV (membangkiti pendidikan). Menurut informasi dari beberapa peserta FGD, informan juga lama bergiat dalam dunia pendidikan (pendiri yayasan pendidikan)	<u>Menengah</u> Alasan: Informan hanya bersikap pasif, menunggu usulan kegiatan/program yang akan dibahas DPRD bersama Dinas Dikpora.	<u>Menengah</u> Alasan: Pengaruh yang diberikan informan sebatas persetujuan atas kegiatan/program yang disampaikan Dinas Dikpora, tidak langsung pada aspek pembelajaran.	<u>Menengah</u> Alasan: Informan tidak memiliki pengaruh langsung pada aspek pembelajaran, tetapi tetap perlu dilibatkan untuk menjaga keberlangsungan program pembelajaran dari dukungan politik atas kebijakan.
Kelompok pelaksana kebijakan				
Kepala UPTD Jonggat	<u>Rendah</u> Alasan: Merasa kewenangannya terbatas, hanya sebagai kepanjangan tangan Dinas Dikpora yang melayani tenaga pendidikan	<u>Menengah</u> Alasan: Walaupun kewenangannya terbatas, informan punya perhatian yang lebih dari sekadar menjalankan tupoksinya. Ia berencana melakukan terobosan dengan mengadakan ujian di UPTD	<u>Rendah</u> Alasan: Sejauh ini pengaruhnya tidak banyak karena hanya sebagai kepanjangan tangan Dinas Dikpora yang melayani tenaga pendidikan	<u>Rendah</u> Alasan: Hanya menjalankan program/kegiatan yang diputuskan atasannya di Dinas Dikpora
Kepala UPTD Pujut	<u>Rendah</u> Alasan: Merasa kewenangannya terbatas, hanya sebagai kepanjangan tangan Dinas Dikpora yang melayani tenaga pendidikan.	<u>Rendah</u> Alasan: Sejauh ini perhatiannya lebih pada memastikan aspek fisik sarana sekolah terjaga baik.	<u>Rendah</u> Alasan: Informan menyatakan bahwa untuk aspek pembelajaran, kepala sekolah lebih memahami masalah	<u>Rendah</u> Alasan: Hanya menjalankan program/kegiatan yang diputuskan atasannya di Dinas Dikpora

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Pengawas SD Kecamatan Jonggat	<u>Tinggi</u> Alasan: Sesuai tupoksinya, informan adalah pihak yang sehari-hari berinteraksi dengan guru dan kepala sekolah. Sesuai tugasnya untuk melakukan supervisi, informan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam peningkatan hasil pembelajaran.	<u>Menengah</u> Alasan: Dalam melakukan supervisi kepada para guru, informan lebih mengandalkan pengalamannya sebagai guru sebelum menjadi pengawas sekolah. Belum banyak upaya yang dilakukan informan untuk menggali pengetahuan baru untuk ditularkan kepada para guru demi peningkatan kualitas pembelajaran.	<u>Menengah</u> Alasan: Informan menyampaikan bahwa hasil pengawasannya banyak tidak ditindaklanjuti oleh guru, kepala sekolah, maupun Dinas Dikpora, padahal menurutnya, hasil pengawasan atau supervisi atas guru dapat membantu sekolah memperbaiki hasil pembelajaran murid karena kualitas murid bergantung pada kualitas guru.	<u>Tinggi</u> Alasan: Dengan pengalamannya yang panjang sebagai guru sebelum menjadi pengawas sekolah, informan sebenarnya sangat memahami kondisi pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah yang diampunya.
Pengawas SD Kecamatan Pujut	<u>Tinggi</u> Alasan: Dengan tupoksi yang dimilikinya, informan bisa dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan kapasitas guru-guru yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan termasuk pengawas sekolah yang secara rutin mendatangi sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab pengawasan untuk melakukan supervisi kepada kepala sekolah dan guru.	<u>Menengah</u> Alasan: Informan masih belum memiliki banyak gagasan untuk membantu guru memecahkan masalah pembelajaran yang mereka hadapi. Hasil supervisinya juga tak banyak ditindaklanjuti para guru dan kepala sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Tanpa melibatkan pengawas sekolah, intervensi terhadap guru atau kepala sekolah tak akan optimal karena malah akan berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan antara guru/kepala sekolah dengan pengawas sekolah.
Pengawas SMP (Al-Maarif NU Al-Manshuriyah)	<u>Tinggi</u> Alasan: Dengan tupoksi memberi supervisi akademik kepada guru dan supervisi manajerial kepada kepala sekolah, informan bisa melakukan analisis bersama dan memberi saran dalam upaya peningkatan pembelajaran	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki banyak pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah sebelum diangkat sebagai pengawas sekolah. Saat menjadi kepala sekolah, informan pernah membuat inovasi Pesantren Kilat via SMS di sekolahnya.	<u>Menengah</u> Alasan: Hasil supervisinya juga tak banyak ditindaklanjuti para guru dan kepala sekolah. Informan menyatakan bahwa para guru masih banyak yang mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban saja.	<u>Tinggi</u> Alasan: Keinginan informan untuk berkontribusi memang tinggi, walaupun tupoksi yang diembannya hanya pada tingkat memberi saran pada guru/kepala sekolah dan menyampaikan laporan ke Dinas Dikpora. Informan penting dilibatkan agar bisa optimal menjalankan tugas sebagai 'teman diskusi' bagi guru dan kepala sekolah, serta agar laporannya ke Dinas Dikpora layak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Pengawas SMP (Tastura Az-Zikra)	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memahami tupoksinya bisa membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan terbilang rajin mendatangi sekolah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dikonfirmasi dengan penjelasan kepala sekolah SMP Tastura Az-Zikra yang mengatakan pengawas sekolahnya selalu memberi informasi setiap ada perkembangan kebijakan, kegiatan pelatihan yang perlu diikuti guru, dan memberi masukan kepada kepala sekolah untuk kepentingan kemajuan sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Dari keterangan kepala sekolah SMP Tastura, saran informan kepada kepala sekolah selalu dituruti.	<u>Tinggi</u> Alasan: Keinginan informan untuk berkontribusi memang tinggi, walaupun tupoksi yang diembannya hanya pada tingkat memberi saran pada guru/kepala sekolah dan menyampaikan laporan ke Dinas Dikpora. Informan penting dilibatkan agar bisa optimal menjalankan tugas sebagai 'teman diskusi' bagi guru dan kepala sekolah, serta agar laporannya ke Dinas Dikpora layak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
Kepala sekolah SDN B	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki pengalaman yang panjang sebagai guru. Dalam kaitan itu, sebagai kepala sekolah, informan memahami berbagai keterbatasan yang dihadapi para guru, baik itu pada kapasitas mengajarnya maupun ketersediaan sarana mengajarnya.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki komitmen memajukan pendidikan di sekolahnya dengan bekerja di luar tupoksinya, seperti berkunjung ke rumah orang tua dari murid yang bermasalah.	<u>Menengah</u> Alasan: Bimbingan yang diberikan informan kepada guru sejauh ini belum membuahkan hasil yang signifikan.	<u>Tinggi</u> Alasan: Komitmen yang ditunjukkan informan untuk memastikan murid tetap bersekolah merupakan bukti perlunya ia dilibatkan dalam peningkatan pembelajaran di sekolahnya.
Kepala sekolah SDN A	<u>Menengah</u> Alasan: Informan tampak kurang menguasai tupoksi dan masalah sebagai kepala sekolah. Saat diwawancarai, informan lebih banyak mengarahkan pertanyaan untuk dijawab oleh para guru yang mendampingi.	<u>Menengah</u> Alasan: Informan lebih banyak menunggu (pasif) atau mengandalkan peran guru lain dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolahnya. Alasan lainnya, ketika dihubungi untuk keperluan studi ini di sekolahnya, awalnya informan beberapa kali menolak dengan berbagai alasan.	<u>Rendah</u> Alasan: Sebagai kepala sekolah tampaknya informan belum berperan baik. Ia lebih banyak mengandalkan peran guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran.	<u>Rendah</u> Alasan: Dengan kurangnya penguasaan atas masalah dan sikapnya berserah pada guru, pelibatan informan tampaknya akan percuma. Namun, posisinya sebagai kepala sekolah mau tidak mau perlu dipertimbangkan.

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Kepala sekolah SMP A	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai kepala sekolah sebuah SMP kecil, informan memiliki komitmen kuat untuk memajukan sekolahnya dengan segala keterbatasan yang ada.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan cukup rajin mencari informasi program yang bisa diakses untuk kemajuan sekolahnya. Contohnya, ia berhasil mendapat bantuan program sekolah berbasis pondok pesantren dari kementerian agama.	<u>Tinggi</u> Alasan: Pengaruh secara langsung terkait pembelajaran memang tak ada, tetapi informan menjalankan kepemimpinannya di sekolah dengan memotivasi guru untuk tetap semangat mengajar sebagai ibadah walau honor kecil.	<u>Tinggi</u> Alasan: Komitmen yang kuat dan motivasi informan tinggi untuk memajukan pembelajaran di sekolahnya.
Kepala Sekolah SMP Tastura Az-Zikra	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan menyadari bahwa pendirian sekolahnya merupakan komitmen pendiri untuk memberi kesempatan sekolah kepada anak yang tidak mampu.	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai kepala sekolah SMP swasta kecil, informan mengakui tidak percaya diri untuk terlibat di MKKS. Namun, ia selalu merasa antusias jika ada kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, seperti pelatihan bagi guru. Dalam kesehariannya sebagai kepala sekolah, informan juga mengaku sering berkeliling ke kelas-kelas untuk melihat guru-gurunya mengajar.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memberlakukan berbagai kebijakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Misalnya, ia membuat kebijakan memisahkan anak yang tertinggal untuk mendapat bimbingan lebih intensif dari guru lain. Selain itu, ia juga rutin mengadakan <i>class meeting</i> (lomba antarkelas) di sekolah untuk memupuk kepercayaan diri murid.	<u>Tinggi</u> Alasan: Komitmen informan yang tinggi dan upaya yang sudah ia lakukan menunjukkan bahwa ia layak dipertimbangkan untuk dilibatkan.
Guru SDN A	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai guru, para informan merupakan pihak yang paling dekat terlibat dalam pembelajaran bersama murid.	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan mengeluhkan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan pembelajaran. Mereka bersedia ikut jika ada pelatihan.	<u>Tinggi</u> Alasan: Dengan pengetahuan yang dimiliki, informan sudah berupaya mengatasi masalah penguasaan materi belajar para muridnya. Misalnya, untuk penguasaan perkalian, para murid diminta membaca perkalian bersama-sama dengan bersuara keras.	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan perlu dilibatkan dalam peningkatan kemampuan metode dan teknik mereka untuk menjalankan pembelajaran bagi murid-murid.
Guru SDN B	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai guru, para informan merupakan pihak yang	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan mengeluhkan kurangnya pelatihan	<u>Tinggi</u> Alasan: Upaya yang dilakukan para informan adalah dengan	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan perlu dilibatkan dalam peningkatan

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	paling terlibat dalam pembelajaran bersama murid.	untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan pembelajaran. Mereka bersedia ikut jika ada pelatihan.	selalu memberi PR kepada murid-murid. Namun, mereka jadi kurang memperhatikan PR yang dibawa anak-anaknya.	kemampuan metode dan teknik mereka untuk menjalankan pembelajaran bagi murid-murid.
Guru SMP A	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai guru, para informan merupakan pihak yang paling dekat terlibat dalam pembelajaran bersama murid.	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan mengakui masih mengalami kesulitan untuk menemukan solusi dari masalah tentang murid yang masih tertinggal dalam memahami materi belajar. Oleh karenanya, para informan mengharapkan adanya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mengajar.	<u>Tinggi</u> Alasan: Untuk mengatasi kesulitan murid dalam memahami materi pelajaran, para informan sering menggunakan metode perumpamaan atau menggunakan bahasa lokal. Cara tersebut sejauh ini dianggap cukup efektif.	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan perlu dilibatkan dalam peningkatan kemampuan metode dan teknik mereka untuk menjalankan pembelajaran bagi murid-murid.
Guru SMP B	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai guru, para informan merupakan pihak yang paling dekat terlibat dalam pembelajaran bersama murid.	<u>Tinggi</u> Alasan: Selain kebutuhan akan pelatihan, para informan juga menyampaikan perlunya penambahan media bantu pembelajaran.	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan mengaku bahwa jika materi yang sedang diajarkan belum dimengerti murid, mereka tak akan beranjak ke materi yang lain.	<u>Tinggi</u> Alasan: Para informan perlu dilibatkan dalam peningkatan kemampuan metode dan teknik mereka untuk menjalankan pembelajaran bagi murid-murid.
Pengurus Yayasan Pendidikan NU Al-Manshuriyah	<u>Tinggi</u> Alasan: Yayasan yang didirikannya memang berfokus pada pendidikan, termasuk pendidikan dasar	<u>Rendah</u> Alasan: Untuk aspek teknis penyelenggaraan pembelajaran, informan menyerahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Mengelola lembaga pendidikan yang memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengenyam pendidikan.	<u>Menengah</u> Alasan: Walaupun secara teknis enggan terlibat, informan tetap perlu diberikan peran mengingat kultur masyarakat Lombok Tengah yang sangat patuh kepada petuah tuan guru.
Kelompok pendukung kebijakan				
Ketua Dewan Pendidikan Lombok Tengah	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memahami benar permasalahan yang ada karena sebelum di Dewan Pendidikan, ia berkarir di dunia pendidikan sampai pensiun. Ia juga disegani oleh	<u>Tinggi</u> Alasan: Perhatian informan terhadap perkembangan pendidikan di daerahnya masih tinggi. Setiap diundang menghadiri kegiatan terkait	<u>Menengah</u> Alasan: Informan sudah banyak memberi rekomendasi dan mengingatkan pejabat Dinas Dikpora untuk perbaikan pendidikan. Namun,	<u>Tinggi</u> Alasan: Komitmennya pada dunia pendidikan masih tinggi. Ia juga disegani oleh pejabat-pejabat di Dinas Dikpora, dan kepala sekolah.

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	pejabat-pejabat di Dinas Dikpora, kepala sekolah, dan Dewan Pendidikan. Ia mempunyai agenda rutin bertemu bupati tiap enam bulan.	pendidikan Loteng, informan selalu hadir.	rekomendasinya masih lebih sering tak ditindaklanjuti.	Dewan Pendidikan punya akses langsung ke bupati.
Ketua MKKS Lombok Tengah	<u>Menengah</u> Alasan: Sebenarnya potensinya tinggi karena informan cukup mampu mengidentifikasi sumber masalah rendahnya pembelajaran di daerahnya. Namun, masa jabatan informan sebagai ketua MKKS sudah akan berakhir. Ia bisa hanya menjadi kepala sekolah biasa jika tak ada jabatan lain.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan cukup intensif menggerakkan organisasi MKKS yang dipimpinnya. Contoh: sebelumnya MKKS tidak punya jadwal pertemuan rutin, saat ini ada pertemuan sebulan sekali.	<u>Menengah</u> Alasan: Sebagai Ketua MKKS, informan kerap mengingatkan kepala sekolah lain untuk mengalokasikan anggaran BOS untuk kegiatan MGMP. Para kepala sekolah mengiyakan, tetapi dalam praktiknya tidak semua kepala sekolah menjalankan kesepakatan tersebut.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk berperan dalam upaya peningkatan pembelajaran di daerahnya. Informan juga terpilih sebagai salah satu kepala sekolah teladan mewakili NTB di tingkat nasional.
Sekretaris PGRI Lombok Tengah	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya peningkatan kapasitas guru sebagai kunci dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ia juga tampak cukup kritis terhadap kebijakan Dinas Dikpora dan tak segan menyampaikan kritik dan gagasannya itu di hadapan pejabat Dikpora.	<u>Tinggi</u> Alasan: Walaupun tak secara eksplisit menyampaikan kesediaannya, informan sendiri memiliki beberapa rencana untuk meningkatkan kualitas guru di Lombok Tengah melalui organisasinya.	<u>Menengah</u> Alasan: Upaya pemerataan dan peningkatan kapasitas guru yang sudah coba dilakukan oleh informan melalui organisasinya kerap diganggu oleh masuknya kepentingan politik dalam penempatan guru dan kepala sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Jabatannya strategis dalam organisasi PGRI sehingga pelibatannya bisa memberi gaung yang kuat pada guru-guru yang menjadi anggotanya.
Ketua Education Community (NGO)	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan sudah berpengalaman melakukan bimbingan dan advokasi kepada guru, murid, dan orang tua murid.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan sudah terbukti banyak terlibat dalam aktivitas pemajuan pendidikan melalui jalur ornop dan PGRI.	<u>Menengah</u> Alasan: Status sebagai aktivis ornop kadang membuat beberapa pihak di pemda bersikap antipati terhadap dirinya.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan memiliki jejaring yang cukup luas dengan pemerhati pendidikan di daerahnya. Sebagai aktivis ornop, pandangan-pandangan kritisnya dibutuhkan sebagai alternatif pemikiran bagi aparatur pemda.

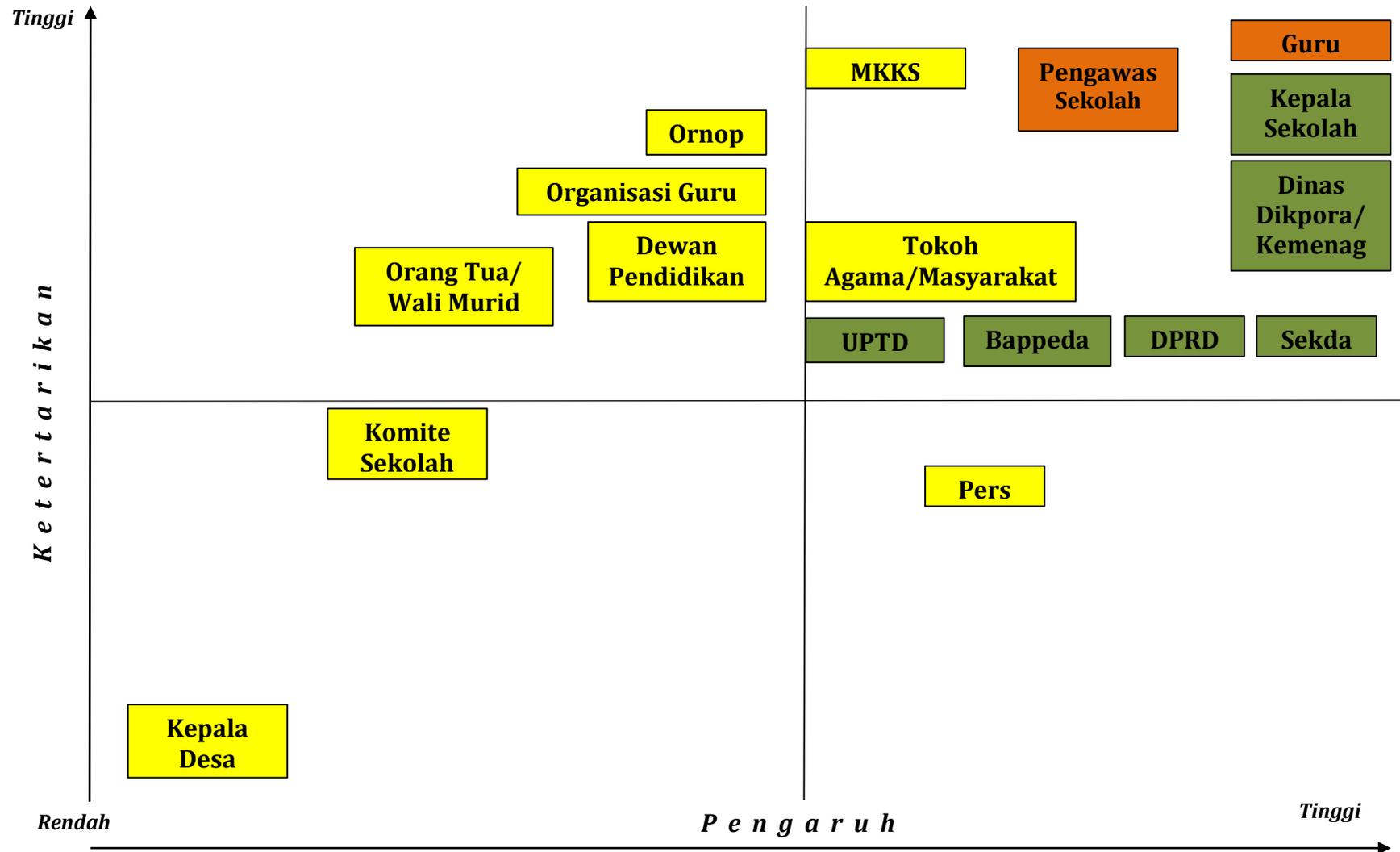
Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Ketua komite sekolah SDN A	<u>Tinggi</u> Alasan: Sebagai ketua komite sekolah, informan terbilang rajin berkunjung ke sekolah untuk bertanya dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi sekolah, walaupun sejauh ini masalah yang dibahas masih sebatas masalah ketersediaan sarana fisik sekolah. Informan juga bisa mengidentifikasi penyebab masalah rendahnya hasil pembelajaran murid, di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya disiplin guru.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan paling memiliki pandangan untuk kemajuan sekolahnya. Walaupun tidak terkait langsung dengan masalah pembelajaran, informan menginginkan agar di sekolahnya bisa dihidupkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sehingga ada saluran aktivitas kreatif bagi para murid.	<u>Rendah</u> Alasan: Sejauh ini keterlibatan informan sebagai ketua komite sekolah dalam penyelesaian masalah di sekolah terbatas hanya pada kebutuhan fisik sekolah semata.	<u>Menengah</u> Alasan: Sebagai ketua komite sekolah, informan memberikan perhatian yang cukup besar pada perkembangan sekolah. Namun, sejauh ini ia lebih banyak menjalankan tugasnya sendiri dan tak banyak melibatkan anggota komite sekolah yang lain.
Ketua komite sekolah SDN B	<u>Rendah</u> Alasan: Informan tidak melihat adanya masalah dalam pembelajaran calistung murid di sekolahnya. Perhatian informan lebih ke soal ketersediaan sarana fisik sekolah.	<u>Menengah</u> Alasan: Kesiediaan informan sejauh ini masih sebatas dukungan untuk penyelesaian kebutuhan fisik sekolah.	<u>Rendah</u> Alasan: Belum ada upaya yang pernah dilakukan informan untuk secara langsung maupun tidak langsung membantu permasalahan pembelajaran di sekolah.	<u>Rendah</u> Alasan: Informan tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Informan sendiri tidak melihat ada masalah pembelajaran di sekolahnya.
Ketua komite sekolah SMP A	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan adalah mantan guru yang dipercaya para orang tua untuk menjadi ketua komite sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan sudah berkomitmen akan turun langsung mendorong orang tua mengikuti program sekolah.	<u>Menengah</u> Alasan: Kewenangan informan terhadap orang tua masih terbatas. Budaya <i>merariq kodeq</i> juga masih kuat di wilayahnya.	<u>Tinggi</u> Alasan: Latar belakang dan komitmen yang dimiliki bisa menjadi pendorong tambahan bagi upaya peningkatan pembelajaran.
Ketua komite sekolah SMP Tastura Az-Zikra	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan selalu aktif dalam kegiatan sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan sudah membuktikan banyak menjalin hubungan dengan orang tua, yayasan, dan masyarakat. Menurut kepala sekolah, informan juga yang rajin mencari murid baru untuk sekolahnya.	<u>Menengah</u> Alasan: Fokus informan sebatas pengembangan fisik sekolah.	<u>Tinggi</u> Alasan: Rekam jejak dan komitmen yang dimiliki selama menjadi ketua komite sekolah ini bisa menjadi pendorong tambahan dalam upaya peningkatan pembelajaran.

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
Orang tua murid SDN A	<u>Rendah</u> Alasan: Banyak orang tua yang sibuk bekerja di luar daerah atau luar negeri. Anak yang dititipkan ke neneknya tak mendapat perhatian.	<u>Rendah</u> Alasan: Cenderung tidak peduli dan menyerahkan urusan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah.	<u>Rendah</u> Alasan: Anak yang tak pernah diberi PR dari sekolah juga tak diminta tetap belajar di rumah.	<u>Rendah</u> Alasan: Mengingat kesibukannya bekerja dan sikap yang cenderung tak peduli, akan banyak kesulitan dalam melibatkan mereka.
Orang tua murid SDN B	<u>Tinggi</u> Alasan: Identifikasi mereka terhadap perkembangan dan masalah yang dihadapi sekolah cukup baik.	<u>Menengah</u> Alasan: Tetap berusaha mengingatkan anak untuk belajar di rumah.	<u>Menengah</u> Alasan: Para orang tua mengaku masih mengalami kesulitan menegur anaknya untuk belajar di rumah karena kuatnya pengaruh acara TV.	<u>Menengah</u> Alasan: Para orang tua memberi perhatian pada anaknya, tetapi mungkin kapasitasnya terbatas karena kesibukan bekerja, tidak mengerti pelajaran anak, dll.
Orang tua murid SMP A	<u>Rendah</u> Alasan: Para orang tua tidak percaya diri untuk membantu anaknya belajar di rumah karena tidak menguasai materi belajar anaknya.	<u>Rendah</u> Alasan: Para orang tua tidak percaya diri untuk membantu anaknya belajar di rumah karena tidak menguasai materi belajar anaknya.	<u>Rendah</u> Alasan: Orang tua tidak pernah membantu anaknya belajar di rumah karena alasan tak menguasai materi belajar anaknya.	<u>Menengah</u> Alasan: Walaupun mengakui tak pernah memberi perhatian, pelibatan orang tua tetap diperlukan untuk setidaknya memotivasi anaknya belajar di luar sekolah.
Orang tua murid SMP Tastura Az-Zikra	<u>Rendah</u> Alasan: Para orang tua sudah 'dimanjakan' dengan layanan sekolah yang memberikan pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah melalui pondok pesantren.	<u>Menengah</u> Alasan: Di pengajian setiap Sabtu di pondok pesantren, para orang tua mengakui sering diberi informasi mengenai perkembangan anak-anaknya. Di pihak lain, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa orang tua kadang bertanya kepada kepala sekolah atau guru terkait perkembangan anaknya di sekolah.	<u>Rendah</u> Alasan: Orang tua tidak pernah membantu anaknya belajar di rumah karena sudah mendapat pembelajaran di sekolah dan pondok pesantren.	<u>Menengah</u> Alasan: Walaupun kebutuhan belajar anak sudah terlayani oleh sekolah dan pesantren, pelibatan orang tua tetap diperlukan untuk setidaknya memotivasi anaknya belajar di luar sekolah.
Kades Gapura	<u>Rendah</u> Alasan: Informan banyak tidak tahu mengenai perkembangan pendidikan dasar di wilayahnya. Namun, sebagai catatan, istrinya	<u>Rendah</u> Alasan: Informan sudah sangat disibukkan dengan tugasnya sebagai kepala desa yang makin kuat seiring berlakunya UU Desa.	<u>Rendah</u> Alasan: Tidak ada pengaruh hubungan kepala desa dan lembaga-lembaga di desa dengan sekolah terkait peningkatan hasil pembelajaran anak-anak di tingkat	<u>Menengah</u> Alasan: Cukup penting melibatkan kades untuk setidaknya mengingatkan warga agar memperhatikan proses belajar

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (Tinggi/Menengah/Rendah)	Kemauan untuk Terlibat (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (Tinggi/Menengah/Rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan Tersebut Dilibatkan (Tinggi/Menengah/Rendah)
	justru lebih banyak tahu dan bisa menjawab pertanyaan wawancara.		pendidikan dasar. Informan menyatakan bahwa ada alokasi dana desa untuk pengembangan pendidikan, tetapi hanya untuk PAUD dan TK sesuai dengan peraturan penggunaan dana desa.	anaknya di rumah. Setidaknya, istri kades bisa dilibatkan.
Kades Labulia	<u>Menengah</u> Alasan: Kewenangan pemdes hanya pada PAUD dan TK. walaupun membicarakan tentang pendidikan dasar, kades lebih berperan sebagai penyambung sekolah dan anggota masyarakat, serta sekolah dan UPTD Pendidikan.	<u>Tinggi</u> Alasan: Informan membangun komunikasi dengan UPTD Pendidikan. Informan juga mengaku bahwa jika jadwalnya sama, ia akan lebih memilih memenuhi undangan sekolah daripada menghadiri rapat koordinasi.	<u>Menengah</u> Alasan: Informan mengaku kerap diundang oleh sekolah-sekolah di wilayahnya untuk berbicara di depan orang tua murid yang notabenearganya sendiri terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak.	<u>Menengah</u> Alasan: Informan perlu didorong lebih jauh untuk bisa turut mengawasiarganya dalam memastikan anak-anak bersekolah dan belajar dengan baik.

LAMPIRAN 5

Peta Pemangku Kepentingan



LAMPIRAN 7

Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Wadah Komunikasi
Dinas Dikpora	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, surat undangan, laporan	- Pertemuan tatap muka secara formal dan informal ² - Insidental
Bappeda	Kabid Sosbud	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, surat undangan, laporan	Pertemuan tatap muka melalui rapat
Sekda	Asisten 1 Bidang Pemerintahan Hukum ³	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, surat undangan, laporan	Pertemuan tatap muka
DPRD	Anggota Komisi D DPRD	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, surat undangan, laporan	Pertemuan formal dan informal
Sekolah	Kepala Sekolah SD dan SMP	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, surat undangan, laporan, kegiatan rutin luar sekolah, undangan lisan (melalui murid)	Rapat dengan orang tua/guru dan pertemuan informal ⁴ serta pertemuan MKKS ⁵
Pengawas SD	Pengawas SD	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, laporan	Rapat dan pertemuan informal ⁶

²Contohnya, para kepala sekolah, guru, atau pengawas sekolah yang mendatangi kantor Dinas Dikpora untuk berkonsultasi atas masalah yang ditemui

³Asisten 1 menyoroti soal minimnya penggunaan teknologi komunikasi oleh guru dan siswa. Menurutnya, teknologi pada prinsipnya hanya alat atau senjata. Dalam pengamatannya, penggunaan teknologi oleh guru dan murid belum maksimal dan belum diarahkan ke hal-hal yang positif; meski ia juga menceritakan sedikit kasus segelintir murid menggunakan teknologi internet untuk mengerjakan tugas di sekolah (melalui Google).

⁴Setiap hari Sabtu, ada pengajian yang dikelola oleh yayasan pondok pesantren yang menaungi SMP B. Para orang tua murid SMP datang ke pengajian tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang tua murid untuk mencari tahu tentang perkembangan belajar anak-anak mereka, serta dimanfaatkan oleh para guru untuk berdiskusi dengan orang tua murid.

⁵Tidak semua kepala sekolah mengikuti pertemuan MKKS yang menurut informasi ketuanya rutin diselenggarakan tiap bulan. Kepala sekolah di kedua SMP lokasi studi mengatakan bahwa mereka sering terlambat mendapat informasi dari MKKS. Penyebabnya adalah karena informasi tidak disampaikan langsung, melainkan melalui ketua rayon.

⁶Contohnya, para pengawas sekolah yang pergi ke sekolah-sekolah untuk meneruskan informasi kepada para guru dan kepala sekolah.

Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Wadah Komunikasi
Pengawas SMP	Pengawas SMP	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Telepon, SMS, surat dinas, laporan	Rapat dan pertemuan informal
Guru	Guru SD	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui tatap muka dan media sosial	Lisan, SMS, WhatsApp (hanya ditemui pada satu guru di salah satu SD lokasi studi, itu pun hanya untuk komunikasi yang tidak terkait dengan pekerjaan)	Rapat, KBM, pembagian rapor kenaikan kelas, pertemuan KKG (tidak rutin)
Guru	Guru SMP	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui suara, media tertulis, dan tatap muka	Lisan, SMS, telepon, Facebook	Rapat, KBM, pembagian rapor kenaikan kelas., pertemuan informal dengan guru SMP lain, pertemuan MGMP ⁷ , diskusi via <i>inbox</i> (terbatas pada membalas pesan murid via <i>inbox</i> dan hanya ditemui di SMP B)
Komite sekolah	Ketua komite sekolah ⁸	Komunikasi langsung dan tidak langsung	Lisan, telepon, SMS (sebagai undangan/pemberitahuan)	Rapat dan pertemuan informal
Murid	Murid SD	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (KBM ==> dengan guru; belajar kelompok ==> dengan murid lain)
Murid	Murid SMP	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan media sosial	- Lisan - Telepon, SMS, Facebook (hanya ketika punya uang untuk beli pulsa)	- Tatap muka (KBM ==> dengan guru; belajar kelompok ==> dengan murid lain) - Tanya kepada guru via <i>inbox</i> (hanya ditemui di SMP B)
Tokoh masyarakat	Kepala desa	Komunikasi langsung dan tidak langsung	Lisan, telepon, SMS	Tatap muka (rapat, pertemuan informal)

⁷MGMP yang diikuti beberapa sekolah ini sudah lama tak aktif. Pertemuan MGMP hanya terjadi di sebagian sekolah dan bersifat internal (guru mata pelajaran dalam satu sekolah), tergantung kebijakan kepala sekolah.

⁸Komite sekolah SMP Islam Al Maarif berpendapat bahwa televisi melemahkan motivasi anak untuk belajar/pergi ke sekolah. Pada pagi hari, anak-anak lebih suka menonton acara kartun SpongeBob SquarePants daripada berangkat ke sekolah. Akibatnya, ketika berangkat pun, mereka sudah terlambat.

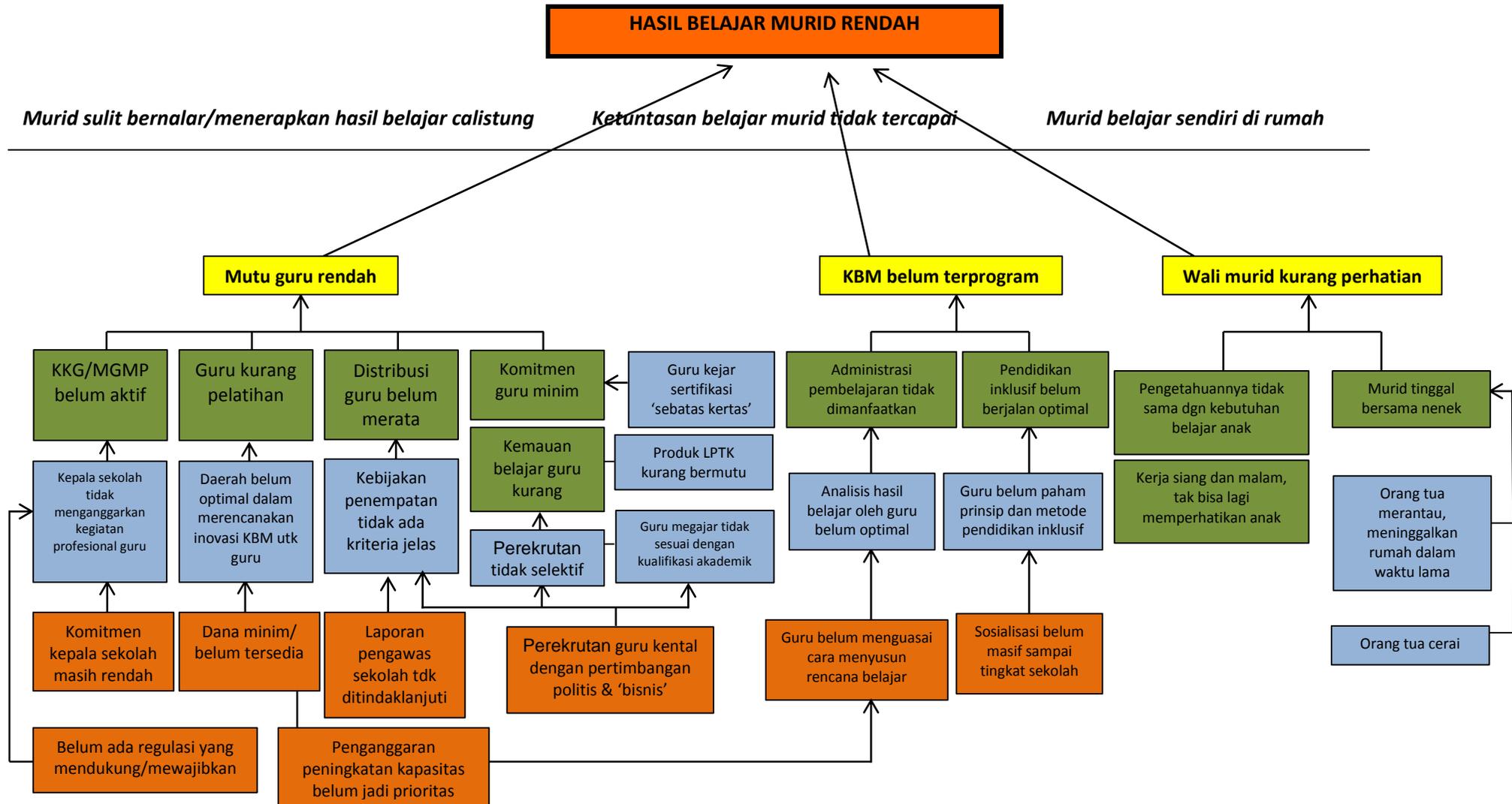
Pemangku Kepentingan	Informan/Responden	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Wadah Komunikasi
Orang tua	Orang tua murid SD dan SMP	Komunikasi langsung dan tidak langsung	Lisan ⁹ , telepon genggam (hanya di SMP di kawasan ibu kota kabupaten)	Tatap muka (Pertemuan dengan guru saat kenaikan kelas dan saat awal tahun ajaran untuk kelas-kelas rendah)
Dewan Pendidikan	Ketua Dewan Pendidikan	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan suara	Lisan, telepon, SMS, surat resmi	- Rapat bulanan dengan bupati, tatap muka (informal dan formal) - Insidental (rekomendasi, pemberitahuan, dll.)
PGRI	Sekretaris PGRI Kabupaten Lombok Tengah	Komunikasi langsung dan tidak langsung	Lisan, telepon, SMS	Tatap muka dengan Bupati, DPRD, Dinas Dikpora untuk kepentingan menyampaikan aspirasi PGRI
Ormas	Ketua PW NU NTB	Komunikasi langsung dan tidak langsung	Lisan, telepon, SMS	Tatap muka (rapat, pertemuan informal)
Ornop	Direktur Education Community NTB	Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui media tertulis dan suara serta media sosial	Lisan, telepon genggam, SMS, WhatsApp, Facebook	Tatap muka (guru menjadi tutor bagi para guru lain) Grup WhatsApp dan Facebook ¹⁰

⁹Mengirimkan surat kepada orang tua murid dianggap tidak sopan. Kultur masyarakat setempat membuat penduduk masih belum memanfaatkan surat sebagai sarana komunikasi.

¹⁰Grup WhatsApp dan Facebook merupakan inisiatif dari informan. Namun, grup tersebut tidak aktif digunakan untuk berdiskusi terkait pembelajaran. Perbincangan lebih banyak tentang persoalan sehari-hari.

LAMPIRAN 8

Analisis Pohon Masalah Pembelajaran Pendidikan Dasar



LAMPIRAN 9

Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah

Lembaga yang Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapabilitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
Dinas Dikpora Tingkat kabupaten dan kecamatan - regulator	Regulasi dan penganggaran terkait pelatihan dan penyegaran untuk membuat guru makin profesional Masalah: pelatihan guru	Para guru berprestasi yang berpotensi menjadi tutor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan regulasi tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan guru secara reguler dan terprogram - Pemda perlu memprioritaskan anggaran pendidikan, khususnya untuk pelatihan dan penyegaran guna meningkatkan profesionalisme guru - Memanfaatkan libur sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan guru
	Komitmen Dinas Dikpora untuk memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bagian dari evaluasi sistem pengelolaan sekolah Masalah: mutu guru rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas sekolah telah terspesialisasi (akademik dan manajemen) - Kuantitas dan rasio pengawas sekolah cukup memadai 	<i>Knowledge management</i> tentang kondisi sekolah yang dihasilkan para pengawas sekolah
Dinas Dikpora Tingkat kabupaten dan kecamatan - regulator	Regulasi tentang kriteria dalam penempatan kepala sekolah dan guru Masalah: distribusi guru yang tidak merata	Sudah ada regulasi yang mengatur penempatan dan masa jabatan kepala sekolah dan guru	Konsistensi Dinas Dikpora untuk menegakkan regulasi tentang penempatan kepala sekolah dan guru sesuai kondisi objektif sekolah tanpa dirusak oleh kepentingan 'bisnis' dan politis
	Penganggaran untuk pelatihan guru dan pembangunan sarana dan prasarana bagi ABK Masalah: deklarasi pendidikan inklusif tidak berjalan	Deklarasi, regulasi (perbup), sekolah percontohan, dan guru yang telah dibekali dengan pendidikan luar biasa	Pemda perlu memprioritaskan anggaran untuk memperbanyak guru dengan pendidikan luar biasa dan membangun sarana dan prasarana kebutuhan anak difabel
Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikan dasar (tingkat kecamatan - pelaksana)	Optimalisasi peran UPTD untuk mendokumentasikan, menganalisis, menyimpulkan, dan menulis laporan hasil pengawasan Masalah: hasil pengawasan kurang diperhatikan	Kepala UPTD dan pengawas sekolah sudah memahami kondisi sekolah karena merupakan orang-orang profesional yang berkarir di bidang pendidikan	Penguatan dan pelimpahan wewenang kepada UPTD untuk mengelola pengawasan dan pembinaan sekolah

Lembaga yang Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapasitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
Kepala Sekolah (tingkat sekolah - pelaksana)	Regulasi yang mewajibkan kepala sekolah untuk mengelola dana sekolah secara transparan, partisipatif, dan akuntabel (guru, komite sekolah, orang tua murid, dan lingkungan) Masalah: guru, komite sekolah, orang tua murid, dan lingkungan jarang terlibat dalam manajemen sekolah	Otonomi sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah (RKS) dan mengelola keuangan sekolah	Internalisasi manajemen sekolah yang menyangkut perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi
Guru (tingkat sekolah - pelaksana)	- Sistem perekrutan guru yang lebih selektif - Memastikan produk LPTK menjiwai profesionalitas guru Masalah: komitmen guru minim	Adanya sertifikasi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi	- Inisiatif mandiri untuk meningkatkan profesionalisme dengan menyisihkan sebagian dari tunjangan profesi - Mahasiswa LPTK diberi ruang luas untuk praktik mengajar di sekolah-sekolah
Komite sekolah (tingkat sekolah - pelaksana)	Pelibatan komite sekolah dalam kebijakan, perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan manajemen sekolah	Regulasi tentang komite sekolah	Berbagai informasi mengenai kegiatan sekolah perlu disampaikan juga kepada komite sekolah (oleh sekolah, UPTD, dan dinas)

LAMPIRAN 10

Tabel A5. Basis Data Inovasi Daerah

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh				Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas /Change Agency (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu	Pe- lak- sana	Peran Lembaga Informan	Mekanisme	Pembia- yaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendi- kan Umum	Kualitas Pembela- jaran	Bagi Pelaku	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Pendidikan Inklusif	Kadis Dikdas Dikpora	Kadis Dikdas Dikpora	Seko- lah	-Membuat kebijakan -Memfasili- tasi pelatihan guru -Memben- tuk Pokja pendidikan inklusif lintas sektor	-Perbup pendidikan inklusif -Sekolah dilarang menolak murid	APBD: Mengalo- kasikan anggaran pelatihan pendidikan luar biasa untuk guru	Adopsi/ Modifikasi dari program Education for All yang sebelumnya dijalankan di Lombok Tengah	Anggaran terbatas, belum semua sekolah ada guru yang terlatih pendidikan luar biasa	-	Tidak ada sekolah yang menolak murid	Tidak ada pengaruh. Murid ABK sekadar senang bersekolah	-		
Pesantren Kilat via SMS	Kepala sekolah SMPN 1 Praya Barat	Kepala sekolah SMPN 1 Praya Barat	Guru PAI (Pen- didi- kan Aga- ma Islam)	Menginform asikan nomor seluler guru PAI kepada para murid	Selama Ramadan, murid bisa bertanya mengenai masalah agama Islam kepada guru PAI	-	-	Tidak ada	Cukup berhasil karena antusiasme murid tinggi. Guru menerima ratusan SMS dari murid	Murid berani bertanya kepada guru	Murid bisa bertanya berdasarkan masalah yang langsung ia hadapi. Pemaha- man murid atas pelajaran agama meningkat	-	Alat teknologi bisa dipakai sebagai media pembelajaran antara murid dan guru	Bisa dipraktikkan dalam mata pelajaran lain
Sepume- Sepuma (Sepuluh Menit Membersihkan Sekolah, Sepuluh Menit Membaca Qur'an)	Kepala sekolah SMPN 1 Praya	Kepala sekolah SMPN 1 Praya	Murid dan guru	Membuat kebijakan/ program di sekolahnya	Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, seluruh murid harus membersih- kan sampah di kelas dan pekarangan	-	Di masa kepada sekolah sebelumnya sudah dilaksana- kan kegiatan 10 menit membaca	-	Berhasil: taman sekolah yang tadinya tampak tak terawat menjadi asri. Sekolah menjadi lebih bersih.	-	Hasil belajar murid meningkat, dilihat dari nilai UN	-	Informan tidak mengklaim bahwa peningkatan itu disebabkan hanya oleh program ini	

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh				Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik			
	Penggagas /Change Agency (lembaga/ individu)	Agen Pembaharu	Pe- lak- sana	Peran Lembaga Informan	Mekanisme	Pembia- yaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendid- kan Umum	Kualitas Pembela- jaran	Bagi Pelaku	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran	
					selama 10 menit. Setelah itu, murid membaca bacaan apapun selain buku pelajaran selama 10 menit.				Alquran sebelum memulai pelajaran					Murid mendapat penyegaran dengan membaca buku sebelum pelajaran dimulai	
Lomba Berpidato (bagian dari <i>class meeting</i>)	Kepala Sekolah SMP Tastura Az- Zikra	Kepala Sekolah SMP Tastura Az- Zikra	Murid dan guru	Memfasili- tasi kegiatan	Setiap kelas berhak mengirim- kan wakilnya (bisa lebih dari satu) untuk berpidato di hadapan murid-murid lain	-		Adopsi dari lomba berpidato/ ceramah	-	Berhasil meningkat- kan kepercayaan diri para murid	Mening- katkan kemam- puan berbaha- sa Indonesia dalam pemakai- an sehari- hari	-	-	Kemampuan berbahasa bisa ditingkatkan melalui praktik, tidak semata dalam kegiatan belajar atau ujian di ruang kelas.	-
Gerakan Literasi	Kemendik- bud	Dikpora Loteng	Seko- lah	Dikpora melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah melalui surat edaran	Membaca buku (bukan buku pelajaran) selama 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai	-	-	Jumlah buku dan judul di setiap sekolah tak merata. Rata- rata sekolah masih kekurangan buku bacaan	Baru dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017	-	-	-	-	-	

LAMPIRAN 11

Tabel A6. Daftar Perolehan Data Sekunder

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Ketersediaan Data	Keterangan
1	Data 2005–2016:		
	a. Regulasi/kebijakan pendidikan (dokumen sidang terbentuknya suatu perda, rapat DPRD dan pemda, dll.)	<ol style="list-style-type: none"> Perda 02 Th 2009 Penyelenggaraan Pendidikan Lombok Tengah.pdf Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.pdf SK Penyelenggaraan PAUD 2015.pdf 	Salinan digital
	b. Daftar program/proyek/kegiatan dan laporan pelaksanaannya	-	
	c. RPJMD dan Renstra Pendidikan	-	
	d. Rencana Kerja (tahunan) SKPD	<ol style="list-style-type: none"> Ringkasan RKA SKPD PPKD 2015 RKPD 2016 	Salinan digital
	e. Laporan tahunan Dinas Pendidikan	-	
	f. Statistik pendidikan:	<ol style="list-style-type: none"> Narasi Profil 2015-2016.doc Profil 2015-2016.xls 	Salinan digital
	i. jumlah, karakteristik, dan sebaran sekolah		
	ii. rasio guru dan murid		
	iii. APK, APM		
		<ol style="list-style-type: none"> Neraca Pendidikan Kab. Lombok Tengah.pdf REKAP KEBUTUHAN GURU GTT TAHUN 2016.xls 	Salinan digital
		<ol style="list-style-type: none"> Keadaan/Jumlah Siswa SDN A, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Data Kepegawaian SDN A, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 	Salinan cetak
	g. Nilai rata-rata ujian nasional sekolah dasar (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	-	
	h. Nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	-	
	i. Tingkat kelulusan ujian nasional (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	-	
	j. Hasil uji kompetensi guru tingkat kabupaten (untuk verifikasi)	-	
	k. Data hasil ujian akhir sekolah di sekolah sampel	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Ujian SDN B 2015-2016.jpg Nilai Ujian SMP A_1.jpg, Nilai Ujian SMP A_2.jpg Nilai Ujian SMP A_3.jpg Nilai Ujian SMP A_4.jpg Nilai Ujian SMP A_5.jpg Nilai Ujian SMP A_6.jpg Nilai Ujian SMP A_7.jpg Nilai Ujian SMP A_8.jpg Nilai Ujian SMP A_9.jpg 	Salinan digital

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Ketersediaan Data	Keterangan
		11. Nilai Ujian SMP A_10.jpg 12. Nilai Ujian SMP A_11.jpg 13. Nilai Ujian SMP A_12.jpg 14. Nilai Ujian SMP A_13.jpg 15. Nilai Ujian SMP A_14.jpg 16. Nilai Ujian SMP A_15.jpg 17. Nilai Ujian SMP A_16.jpg 18. Nilai Ujian SMP A_16.jpg 19. Hasil Ujian SMP B_1.jpg 20. Hasil Ujian SMP B_2.jpg 21. Hasil Ujian SMP B_3.jpg	
		22. Daftar Kolektif Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) SD/MI SDN B, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Salinan cetak
2	Data dan dokumen terkait anggaran 2015–2016		
	a. Perda APBD 2016	-	Salinan digital
	b. Perda APBD Perubahan 2015	-	
	c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015	Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten Lombok Tengah 2014	
	d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perubahan (DPA-P) Dinas Pendidikan 2015		
	e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan 2016	-	
	f. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan 2015	-	
3	Dokumen lain	1. BANSOS 2014.xlsx 2. JAMKESMAS NTB 2014.xlsx 3. data posyandu - Copy.xlsx 4. PKH 2014.xlsx 5. PERDA No. 7 Tahun 2011 Tentang RTRW KAB LOTENG.pdf	Salinan digital dari Bappeda
		6. praktik baik ntb.pdf	Salinan digital
		7. Perda 03 Th 2009 Perlindungan Anak & Perempuan Korban Kekerasan.pdf	

LAMPIRAN 12

Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
1. Tahap Persiapan	Merancang penelitian: mencari metode yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada <i>terms of reference</i> (ToR) - Pemilihan nama sekolah tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunggu kepastian sekolah sampel dari tim INOVASI - Menerjemahkan ToR ke dalam rancangan penelitian sehingga diperoleh metode pengumpulan dan analisis data yang tepat - Memilih pendekatan analisis yang paling tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan komunikasi secara intensif dengan tim INOVASI - Melakukan rapat-rapat dengan seluruh anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar dan peta lokasi sekolah sampel - Tujuan penelitian disepakati - Metode pengumpulan data: wawancara mendalam (WM), wawancara kelompok (WK), dan FGD - Metode analisis data
	Menyusun instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan penelitian yang jelas sudah dirumuskan - Metode penelitian (pengumpulan dan analisis data sudah disetujui bersama) - Pembagian tugas di antara anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyamakan pemahaman tentang definisi kunci, misalnya hasil pembelajaran, kualitas, tolok ukur, dll. - Penyesuaian pertanyaan atau data yang ingin digali dengan waktu yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf awal instrumen yang sudah dibuat oleh anggota tim didiskusikan kembali dalam rapat tim - Masing-masing anggota kembali memperbaiki instrumen berdasarkan hasil diskusi tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf instrumen yang siap digunakan untuk pelatihan dan uji coba
	Pelatihan dan uji coba instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi dan jadwal uji coba harus ditetapkan sejak awal - Izin kunjungan sudah diterima dari pihak berwenang di lokasi uji coba - Mendapat daftar pemangku kepentingan dan nomor kontakannya - Penyiapan logistik yang relevan dengan kebutuhan: 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan waktu pelaksanaan yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota tim - Sebagian pemangku kewenangan yang dihubungi menginginkan pemberitahuan lebih awal - Sebagian pemangku kepentingan tidak merespon permohonan uji coba instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim melakukan rapat untuk menyepakati lokasi dan jadwal uji coba - Mengirimkan anggota tim ke lokasi uji coba untuk menemui informan-informan kunci, menyepakati jadwal, dan sekolah yang dijadikan uji coba 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi uji coba: Purwakarta - Tim berhasil menyepakati jadwal dengan Dinas Dikpora Kabupaten Purwakarta. Pihak Dinas Dikpora bersedia mengontak dan mengatur jadwal WM dan WK dengan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		pengumpulan data, transportasi, komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu untuk mengontak pemangku kepentingan yang dilibatkan terlalu sempit - Tantangan selama uji coba di lapangan: <ul style="list-style-type: none"> o Instrumen terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk wawancara (khususnya WM) o Pemangku kepentingan banyak yang mengaitkan peningkatan pembelajaran dengan peningkatan karakter/akhlak murid o Informan WK rata-rata sangat aktif. Sekolah yang dipilih merupakan sekolah unggulan o Pengisian instrumen analisis masih membingungkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi bersama semua anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> informan yang dibutuhkan - Perbaiki instrumen pengumpulan data: mempertajam yang kurang jelas, mengurangi pertanyaan ganda - Perbaiki instrumen analisis dengan memberi keterangan sumber isian pada setiap kolomnya (berdasarkan jawaban dari setiap nomor pertanyaan)
2. Tahapan Pengumpulan Data di Lombok Tengah	Menyusun daftar pemangku kepentingan dan nomor kontak	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan daftar hadir peserta sosialisasi program INOVASI di tingkat provinsi sebagai basis awal informasi kontak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua informan yang dibutuhkan ada dalam daftar hadir yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode <i>snowball</i> untuk mendapatkan informasi kontak pemangku kepentingan yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar kontak pemangku kepentingan dapat dilengkapi
	Mengontak informan kunci (<i>gate keeper</i>) – menjadwalkan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti lokal coba mengontak informan kunci untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara sebelum tim turun ke lapangan - Peneliti lokal datang langsung ke sekolah untuk menjelaskan kebutuhan wawancara di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa informan tidak menjawab ketika dikontak - Ada kepala sekolah yang tampak menghindar untuk ditemui - Sebagian informan (terutama di sekolah) sedang disibukkan dengan persiapan tahun ajaran baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Terus mengontak informan selama proses pengumpulan data di lapangan - Langsung mendatangi informan ke rumah dan/atau kantornya (<i>go show</i>) - Menyesuaikan jadwal wawancara dengan jadwal 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal wawancara berhasil disepakati dengan setiap informan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
				sekolah yang sedang memulai tahun ajaran baru	
	Melakukan wawancara (WK dan WM)	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal wawancara yang disepakati dengan setiap informan - Tim melakukan evaluasi harian untuk menghitung jadwal lapangan yang tersedia dengan jumlah wawancara yang harus dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa informan membatalkan jadwal wawancara karena ada keperluan lain - Masih ada sekolah yang salah memahami kebutuhan wawancara di sekolah (misalnya, yang dibutuhkan adalah orang tua dari murid yang diwawancarai, tetapi yang disiapkan adalah orang tua dari murid yang berbeda) - Syarat wawancara: minimal harus dilakukan dua orang per informan/ kelompok informan - Masih ditemukan pertanyaan yang senada dalam instrumen - Beberapa wawancara dijadwalkan sampai FGD diselenggarakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadwal ulang wawancara dengan informan terkait - Untuk WK orang tua: tetap menggunakan informan yang ada karena kepala sekolah beralasan orang tua murid yang dimaksud tak ada di tempat - Pertanyaan yang senada tak lagi ditanyakan - Wawancara dilakukan setelah FGD 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh informan berhasil diwawancarai, kecuali media lokal karena beberapa kali janji wawancara tak ditepati oleh informan
	Menyelenggarakan FGD	<ul style="list-style-type: none"> - Menyepakati jadwal dan tempat penyelenggaraan FGD dengan Dinas Dikpora - Menyepakati daftar peserta FGD dengan Dinas Dikpora - Tim menyiapkan bahan untuk dipresentasikan: <ul style="list-style-type: none"> o Analisis pohon masalah o Analisis penyelesaian masalah o Analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan siapa yang mengundang FGD; untuk memastikan peserta bersedia hadir - Ada informan yang dinominasikan oleh Dinas Dikpora sebagai peserta FGD dan tidak begitu jelas mengapa peserta itu diundang - Tidak ada ruangan yang memadai untuk FGD di Dinas Dikpora - Hari pelaksanaan FGD berdekatan dengan dua hari pelaksanaan Roadshow Program INOVASI. Peserta kedua acara pun relatif sama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf undangan disiapkan oleh SMERU dan undangan ditandatangani oleh Dinas Dikpora sebagai pihak yang mengundang - FGD dilaksanakan di hotel tempat tim menginap dan jadwal menyesuaikan dengan kegiatan pelatihan SPM Dinas Dikpora (hari yang sama tetapi mulainya pada sore hari) - Tim peneliti secara intensif menelepon Kabid Dikdas Dikpora yang bersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - FGD menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> o Analisis pohon masalah o Analisis penyelesaian masalah o Analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan o Jaringan pemangku kepentingan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		<ul style="list-style-type: none"> o Jaringan pemangku kepentingan o Kebijakan/inovasi yang dijalankan di kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Dikpora mempunyai jadwal yang sangat padat, termasuk kegiatan pelatihan SPM Dinas Dikpora dan keterlibatan Dinas Dikpora dalam MTQ Nasional - Dalam FGD, peserta menambahkan informasi sesuai pengetahuan - Dalam FGD, pendapat peserta banyak diwarnai kepentingannya - Proses FGD memakan waktu jauh lebih lama dari perkiraan. Diskusi pada bagian “Analisis Pohon Masalah” menyita waktu yang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - menjadi jembatan antara peneliti dan para undangan supaya Kabid Dikdas menghubungi para undangan untuk memastikan mereka datang - Dita Nugroho turut melobi para peserta Roadshow Program INOVASI untuk datang di FGD yang merupakan kesempatan bagi tim peneliti untuk memaparkan hasil pemetaan - Pandangan peserta diakomodasi setelah dikonfirmasi ke peserta yang lain - Memodifikasi metode FGD pada bagian “Analisis Pengaruh/Ketertarikan Pemangku Kepentingan” dan “Jaringan Pemangku Kepentingan”, yaitu dengan bertanya langsung kepada peserta (tidak memaparkan hasil analisis tim) 	<ul style="list-style-type: none"> o Kebijakan/inovasi yang dijalankan di kabupaten
	Mengumpulkan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar data yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Walaupun daftar sudah diberikan, data belum diperoleh dengan lengkap karena ada kesalahpahaman. Salah satu penyebabnya karena Kabid Dikdas mendelegasikan pengumpulan data kepada salah seorang stafnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena sampai studi lapangan berakhir data yang dibutuhkan belum terkumpul lengkap, tim mendelegasikan tugas kepada peneliti lokal untuk berkomunikasi dengan Kabid Dikdas Dinas Dikpora agar 	Kecuali dokumen-dokumen yang belum selesai, data sekunder terkumpul lengkap

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa data, seperti RPJMD dan Renstra Dikpora, belum ada karena belum selesai disusun (bupati baru belum selesai menyusun RPJMD sebagai basis penyusunan Renstra SKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kekurangan data sekunder 	
3. Tahapan Analisis Data	Entri data	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan lapangan (catlap) sebagai data mentah - Tabel entri data sudah tersedia - Transkrip verbatim rekaman wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Catlap tak bisa diselesaikan saat proses penelitian di lapangan karena sedikitnya waktu yang tersedia - Transkrip verbatim memerlukan sumber daya yang banyak dan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Entri data dilakukan oleh tim di Jakarta - Ada koordinator penggabungan entri data - Transkrip verbatim dialihdayakan kepada pihak lain dan anggota tim tersebar di berbagai provinsi - Ada peneliti yang bertugas sebagai koordinator transkrip verbatim 	<ul style="list-style-type: none"> - Entri data diselesaikan di Jakarta - Transkrip verbatim dikumpulkan secara bertahap
	Analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Entri data selesai dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal yang sempit untuk mengirimkan laporan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses analisis untuk laporan kabupaten dilakukan dengan diskusi tim berdasarkan catatan buku 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pointers</i> untuk setiap topik laporan disepakati
	Penyusunan laporan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh data selesai dianalisis - Garis besar laporan tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal yang sempit untuk mengirimkan laporan kabupaten - Banyaknya lampiran yang menyertai laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas di antara anggota tim untuk membuat laporan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kabupaten dikirim sesuai jadwal
	Revisi laporan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Ada umpan balik dari tim INOVASI - Diskusi dengan sesama anggota tim untuk perbaikan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Umpan balik datangnya terlambat dan anggota tim sudah disibukkan dengan penelitian lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap meluangkan waktu untuk menuntaskan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan versi final dikirim

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

